

345  
W/D

P

c.1



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM  
MASALAH PENAHANAN DAN PIDANA  
PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

**Tesis**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ERMANIA WIDJAJANTI, SH.**

**NIM : B4A 097 026**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2001**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MASALAH PENAHANAN DAN PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

Disusun Oleh :

ERMANIA WIDJAJANTI, SH.  
NIM : B4A 097 026

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 4 Januari 2001


Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130 350 519

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan.”**

Penulis menyadari meskipun penelitian dan penyusunan tesis ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi karena keterbatasan pengetahuan yang ada maka tesis ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. Selaku Ketua Program Studi (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tulisan ini dapat terwujud.
2. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH. yang dengan pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang metodologi penelitian hukum telah memberikan masukan berharga pada saat review proposal tesis ini berlangsung.

3. Bapak Prof. Dr. IS. Soesanto, SH. yang dengan pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang perlindungan hukum bagi anak telah memberikan masukan berharga pada saat review proposal tesis ini berlangsung.
4. Semua Bapak dan Ibu Guru penulis dari SD Negeri Pegulon 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, sampai SMA Negeri 1 Pekalongan, serta semua Dosen dan Asisten Dosen pada FH-UNDIP Semarang dan Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang yang telah membekali penulis ilmu untuk memahami dan mengerti akan ciptaan-Nya serta sesuatu yang terjadi diantara pergantian siang dan malam.
5. Bapak Kapoltabes Semarang, Kasat Serse, Kanit Ristek, Kaur Bin. Ops. beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Poltabes Semarang.
6. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Kasi Pidum, beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Bapak dan Ibu Hakim beserta seluruh staf yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
8. Bapak Kepala Bapas Semarang, Kasi Bimbingan Klien Anak, beserta staf yang telah membantu penulis melakukan penelitian selama di Bapas Semarang.

9. Bapak Kepala Lapas Pemuda Plantungan, Kasubsi Pembinaan Anak Didik beserta staf yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Lapas Pemuda Plantungan Kendal.
10. Bapak Kepala Lapas Anak Kutoarjo, Kasubsi Pembinaan Anak Didik beserta staf yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Lapas Anak Kutoarjo Purworejo.
11. Bapak Endar Pulungan SH., Bapak Amiruddin Aburaera, SH., dan Ibu Endang Suparsetyani, SH, ketika menjabat sebagai Dekan, Pembantu Dekan I dan II FH - Trisakti Jakarta yang telah mempercayai, memperjuangkan dan membantu penulis untuk dan selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.
12. Bapak Adi Andoyo Soetjipto, SH, Bapak Hasni, SH.MH. dan Ibu Muriani, SH.MH. selaku Dekan dan Pembantu Dekan I dan II FH – Trisakti Jakarta sekarang ini yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.
13. Bapak dan Ibu staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bantuan.
14. Rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP angkatan XVI atas segala dorongan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Raharso Martosudirdjo atas segala asuhan dan didikannya dan sampai sekarang masih merupakan pedoman bagi penulis. Dan dengan bathin penulis menghadap almarhumah tercinta Ibunda Sri

Asiyah, semoga Allah SWT menerima ibunda dengan segala pengorbanan selama hidupnya yang telah membesarkan dan mengasuh penulis dengan suci dan tulus.

Serta dukungan dan kepercayaan yang terus menerus dari suami dan anak tercinta Yusuf Triyuwana, SH dan Farrel Yusuf Ramadhan, penulis sangat berterima kasih sekali dan bangga bahwa mereka adalah bagian dari hidup penulis.

Semoga Allah SWT. memberikan imbalan kepada beliau atas amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap mudah-mudahan apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat, terutama bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semarang, Januari 2001

Penulis

# **THE CHILDREN LEGAL PROTECTION AGAINST THE DETENTION AND DEPRIVATION OF THE LIBERTY OF A JUVENILE**

By : Ermania Widjajanti  
Magister of Law Science Postgraduate Program  
Diponegoro University

## **ABSTRACT**

The children legal protection is such a national development since it is purposed to protect and develop the mankind throughly. This effort could be meant as human sources protection for the sake of the next generation's life.

The children's hard life may be the prominent cause of the deviations which will bring them into the law to justify the crimes they commit to be then prosecuted before the court.

Some international instruments have tried to provide the children legal protection against the deprivation of the liberty of a juvenile and sentencing (ie. "Convention of The Right of The Child, Standard Minimum Rule for The Administration of Juvenile Justice and The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty") has accomplished the regulations to provide the children legal protection against the deprivation of the liberty of a juvenile and sentencing. The provisions stated there in have not provided its fully protection against the deprivation of the liberty of a juvenile and sentencing- especially the right for the different treatment from the adult. But anyway, the effort for the children legal protection have been showed.

Pursuant to the above condition stated above, it is understood the importance to have legal protection against the deprivation of the liberty of a juvenile and sentencing to minimize the negative impact towards those children this effort as the last option to be applied as short as possible.

## ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini sesuai dengan hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Perlindungan terhadap anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani untuk generasi yang akan datang

Realita kehidupan seorang anak yang keras, tidak jarang akan mengakibatkan anak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Keterlanjuran seorang anak melakukan kejahatan karena perbuatannya yang menyimpang tersebut akan membawa seorang anak dihadapkan pada proses hukum untuk mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukannya. Untuk selanjutnya dihadapkan pada proses peradilan pidana.

Beberapa instrumen internasional berusaha memberikan perlindungan hukum bagi anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, yaitu Convention on The Right of The Child, Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice dan The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty. Sejalan dengan hal ini, dalam perundang-undangan di Indonesiapun sudah ada usaha untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, yaitu Undang-Undang No.3/1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Terutama tentang hak-hak untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai anak yang mempunyai sifat berbeda dengan orang dewasa.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan pada anak, maka hendaknya penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan itu digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu

sesingkat mungkin. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka perlindungan hukum bagi anak dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan perlu sekali dilakukan untuk memperkecil dampak negatif yang melekat pada anak yang berkonflik dengan hukum.

UPT-POSTAK-UNDIP



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran .....	12
E. Metode Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan .....	26
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak dan Batas Usia Pertanggungjawaban .....	28
B. Pengertian Kenakalan Anak .....	35
C. Pengertian Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan .....	45
D. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	57
E. Lembaga yang Berkaitan dengan Upaya Perlindungan Anak .....	69

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan Dilihat dari Standar Internasional .....	92
B. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Masalah Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan..	132
C. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan .....	150

### **BAB IV : P E N U T U P**

A. Kesimpulan.....	169
B. Rekomendasi .....	174

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Pengaturan Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan...	131
Tabel 2 : Rekapitulasi Tanggapan Anak Binaan Terhadap Kondisi Fisik Ruang Tahanan per-Nopember 2000 .....	138
Tabel 3 : Rekapitulasi Tanggapan Anak Binaan Terhadap Pembinaan yang Diberikan oleh Lapas per-Nopember 2000 .....	143
Tabel 4 : Rekapitulasi Tanggapan Anak Binaan Terhadap Sikap dan Tindakan Aparat Lapas per-Nopember 2000 .....	145
Tabel 5 : Rekapitulasi Tanggapan Anak Binaan Terhadap Pelayanan Kesehatan Per-Nopember 2000 .....	147
Tabel 6 : Rekapitulasi Penilaian Aparat Lapas Kutoarjo Sehubungan Sikap dan Tindakan Anak Binaan per-Nopember 2000 .....	148
Tabel 7 : Jadwal Aktifitas Anak Binaan Setiap Hari di Lapas Kutoarjo ....	149

## DAFTAR SINGKATAN

BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
ECOSOC	: Economic and Social Council
FK-PPAI	: Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia
IFCW	: International Forum Children Welfare
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LITMAS	: Penelitian Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MvT	: Memorie van Toelichting
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PK	: Perampasan Kemerdekaan
POLTABES	: Kepolisian Kota Besar
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
SE-JA	: Surat Edaran Jaksa Agung
SE-MA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SMR-JJ	: Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
UNICEF	: United Nations Children's Fund
YKAI	: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Mendengar sebutan “anak”, maka pemikiran kita akan tertuju pada sosok-sosok manusia “kecil”<sup>1</sup> yang hidupnya penuh dengan kesucian, kegembiraan dan meniru sesuatu yang asing baginya, ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam pendengarannya, dan cita-cita masa depan yang akan diraihinya. Kondisi demikian menempatkan anak itu pada posisi kritis yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari berbagai pihak, tidak hanya orang tua (keluarga), tetapi juga lingkungan dimana anak bermain atau bersosialisasi.

Konsepsi ideal dari sosok yang disebut anak, sebagaimana dikemukakan di atas ternyata tidak berlaku umum dan menyeluruh. Kenyataannya ditengah-tengah kehidupan kita tidak sedikit dijumpai anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati keceriaan dan kegembiraan masa kanak-kanaknya. Bahkan tidak sempat mengecap pendidikan, baik formal maupun informal, yang akan memberikan landasan ataupun dasar dalam meraih atau mewujudkan cita-citanya di masa depan. Kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan yang dialami oleh anak, kerap kali mengantarkan seorang anak pada suasana kehidupan yang sebenarnya belum patut untuk digeluti. Mengamen, berdagang koran di perempatan jalan, menyemir dan mengelap mobil di perempatan lampu merah

---

<sup>1</sup> Lihat WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, edisi VI, kata “anak” diartikan sebagai manusia yang masih kecil (keadaannya) dan kata “kecil” diartikan karena keadaannya sehingga jangan hanya ditafsirkan kepada ukuran fisik tetapi juga non fisik, yaitu umur dan pemikiran.

merupakan fenomena dari kehidupan anak-anak yang mempunyai nasib tidak beruntung dalam kondisi sosial ekonomi.

Realita kehidupan anak dari uraian tersebut di atas, tidak jarang untuk selanjutnya mengantar anak-anak tersebut ke dalam suasana kehidupan gelap dan lebih keras. Mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang berskala kecil sampai melakukan tindakan kriminal seperti : judi, mencuri, dan bahkan melakukan pembunuhan. Terhadap tindakan-tindakan kriminal ini selanjutnya akan mengantar seorang anak pada terali besi (penjara).

Keterlanjuran seorang anak melakukan kejahatan, dikarenakan perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian dan membahayakan tidak hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Akibatnya seorang anak akan dihadapkan dengan proses hukum untuk mempertanggungjawaban kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum, tiap-tiap orang yang melanggar dan atau menyimpang dari hukum harus diproses melalui jalur hukum. Untuk itu diperlukan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin.<sup>2</sup> Semua pihak menyetujui peranan (role of the child) “anak adalah harapan masa depan” sebagaimana komitmen politik dalam GBHN atau “*anak hon mi do hamoraon di ahu*” (anakku adalah yang paling berharga bagiku) dan “anakku adalah semangat hidupnya (tondiki).”<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan hakekat

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal.226

<sup>3</sup> kata bijak masyarakat etnis Batak, Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Perlindungan terhadap anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani untuk generasi yang akan datang.

Sesungguhnya pembangunan anak itu sendiri terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut, terdapat empat pokok pikiran yang mendasari disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu :<sup>5</sup>

Pertama, anak yang merupakan bagian dari generasi muda adalah aset bangsa. Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh yang akan menjamin dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu upaya pembinaan yang terus menerus dan terpadu demi kelangsungan hidup,

---

<sup>4</sup> Purnianti, Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Makalah Semiloka : "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

<sup>5</sup> Risalah Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Buku I, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 1997, hal. 79-83.

pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari segala macam bentuk marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka.

Upaya pengembangan generasi muda tersebut, acapkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah. Disamping itu terdapat pula anak yang dalam keadaan terlantar, yakni anak yang karena satu dan lain hal tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, anak-anak tersebut baik sengaja ataupun tidak, sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak-anak tersebut sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakter yang khusus. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya yang berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikapnya dari pada nilai pribadinya. Oleh karena itu dalam menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggungjawab daripada anak itu sendiri.

Berbagai perilaku yang menyimpang atau perbuatan yang melanggar hukum, anak tertentu adakalanya terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.



Dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan peradilan yang khusus bagi anak.

**Kedua,** Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisa sejarah bahwa keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditujukan kepada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak, penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak.

**Ketiga,** di Indonesia sendiri, secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak tersebut, sebenarnya sudah sejak lama diberikan. Hal ini terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan sosial seperti : Yayasan Pra Yuana dan Wisma Pamardi Siwi. Perhatian dan rasa peduli terhadap nasib anak-anak tersebut semakin menampakkan bentuknya, terutama ketika Departemen Sosial bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan dan Mahkamah Agung pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Oktober 1970 menyelenggarakan workshop mengenai masalah anak dan pemuda dalam kaitannya dengan hukum pidana dan acara pidana, pendidikan, sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan.

**Keempat,** secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (Convention of The Right on the Child) tahun 1959 yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor

44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.

Sedangkan dalam konsiderans Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa : anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Kepedulian terhadap eksistensi anak ini telah mendapatkan dukungan dengan diterimanya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Dalam preambuli Konvensi tersebut terkandung norma-norma yang penting yaitu :

1. Pengakuan bahwa demi perkembangan anak yang bersangkutan secara penuh dan harmonis, maka anak harus dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarganya dengan penuh kasih sayang dan penuh pengertian;
2. Anak dengan berbagai kekurangmatangan fisik dan mental, membutuhkan perhatian dan penjagaan secara khusus termasuk kebutuhan akan perlindungan hukum;

3. Perlindungan anak dilakukan dengan tetap memperhatikan pentingnya peranan nilai-nilai tradisi dan kultural dari setiap bangsa sejauh menyangkut perlindungan dan perkembangan anak secara harmonis.

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak telah dimulai sejak dini dimaksudkan untuk membentuk generasi penerus cita-cita bangsa. Dalam Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa seorang anak harus dilindungi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak<sup>6</sup>

Masalah perlindungan anak ini ditujukan kepada semua anak tanpa terkecuali guna mewujudkan kesejahteraan anak. Sehubungan dengan perlindungan anak tersebut maka dalam Undang-undang Nomor :4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa :<sup>7</sup>

“Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat dipenuhi secara wajar didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus yaitu :

1. Anak yang tidak mampu;
2. Anak terlantar;

---

<sup>6</sup> Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 butir 1 a UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak).

<sup>7</sup> Penjelasan UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Anak yang mengalami masalah kelakuan;
4. Anak yang cacat rohani dan atau jasmani”.

Proses peradilan pidana, merupakan sebuah proses peradilan yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana, terhadap seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan kejahatan. Proses ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan hukum pidana tersebut. Proses tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah sistem, yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang berarti dalam sistem terdapat sub-sub sistem. Konsekuensinya terdapat lembaga-lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pidana tersebut. Dapat dikatakan bahwa tahapan-tahapan itu terkait erat dengan lembaga-lembaga yang ada. Seperti : tahap pemeriksaan penyidik di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, tahap peradilan dan pengambil keputusan ada di Pengadilan (kehakiman), dan pelaksanaan hukuman adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Apa yang terdapat dalam tahapan-tahapan pada masing-masing lembaga tersebut, bermaksud untuk mengemukakan, bahwa adanya kewenangan dari tiap-tiap lembaga untuk melakukan proses hukum, sehubungan dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh seseorang.

Penahanan dalam bentuk apapun yang dilakukan, pada hakekatnya merupakan pembatasan gerak dan aktivitas dari orang yang ditahan. Dengan demikian penahanan juga merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan bergerak dan atau beraktivitas. Bagaimana mungkin seseorang dapat berbuat sesuatu dengan leluasa bila kondisinya diawasi dan atau ditahan.

Dalam kondisi demikian ini, penahanan juga dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya terdapat pada diri orang yang ditahan, tetapi juga mereka-mereka yang dekat dan menjadi tanggung-jawab orang yang ditahan (dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup).

Memperhitungkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari penahanan dan atau perampasan kemerdekaan, tidak lain untuk mewujudkan proses pemidanaan yang tidak hanya berorientasi kepada perlindungan sosial (social defence) tetapi juga berorientasi terhadap perlindungan hak-hak orang yang ditahan. Atau dengan kata lain agar dalam proses pemidanaan tergambar adanya kepentingan yang harus dilindungi, yaitu masyarakat dan sipelanggar (azas monodualistik). Untuk itu perlu diadakan perlindungan terhadap sipelaku yang ditahan. Terlebih jika yang ditahan tersebut adalah anak-anak. Terhadap anak yang ditahan dan atau kemerdekaannya dirampas, masih atau sedang menjalani sebuah proses peradilan pidana maka perlu sekali dipertimbangkan berbagai hal demi masa depan anak tersebut.

Bertitik tolak dari gambaran-gambaran yang diuraikan diatas, dalam penyusunan atau penulisan tesis ini, penulis memfokuskan pada persoalan anak-anak sebagai pelaku kejahatan, mencoba untuk menganalisis tentang perlindungan hukum dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan terhadap anak.

## B. Perumusan Masalah

Secara umum, masalah dapat dikatakan sebagai suatu persoalan yang perlu mendapat pembahasan ataupun jawaban. Dalam sebuah penelitian permasalahan tidak hanya menempati sebagai makna atau arti yang terkandung didalamnya, tetapi juga berfungsi sebagai landasan/patokan yang mengarahkan dan membatasi aktualitas peneliti untuk dapat sampai pada fokus ataupun inti dari judul/topik yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk sampai pada sasarannya dirasa perlu menentukan permasalahan-permasalahan sebagai landasan dari pembahasan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan perundang-undangan dan praktek tentang penahanan serta penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan standar internasional dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berada dalam penahanan atau pidana perampasan kemerdekaan ?
3. Kebijakan apa yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari segi teoritis, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan tentang penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan standar internasional dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Untuk mengetahui kebijakan apa yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan.

Dari segi praktis, penelitian ini berguna untuk :

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana anak.
2. Memberikan wacana tambahan tentang studi hukum pidana anak khususnya dalam hal perlindungan bagi anak dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam menempuh langkah-langkah kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun salah satu acuan didalam penentuan dan perumusan kebijakan yang efektif

untuk diterapkan guna memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Persoalan perlindungan hukum terhadap anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan, merupakan persoalan dalam Sistem Peradilan Pidana (Anak). Dimana terdapat komponen-komponen dalam wujud dan bentuk yang berbeda, namun semuanya terikat atau merupakan bagian dari sistem tersebut.

Secara organisatoris Sistem Peradilan Pidana merupakan kesatuan dari lembaga-lembaga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang terikat dalam fungsi dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana. Masing-masing lembaga tersebut diatur oleh undang-undang. Kepolisian mempunyai Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan mempunyai Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan. Sedangkan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan pada tanggal 31 Juli 1999 disetujui oleh DPR dan Pemerintah menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan masing-masing lembaga ini secara struktural terpisah satu sama lainnya. Perbedaan struktur organisasi dari masing-masing lembaga tersebut, menimbulkan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sejauhmana perbedaan karakter dari masing-masing lembaga dapat ditolerir, sehingga dalam



bekerjanya lembaga tersebut dapat mewujudkan perlindungan hukum , khususnya perlindungan hukum bagi anak yang ditahan dan dijatuhi pidana.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu organisasi sama dengan organisasi lainnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dipolakan begitu saja atau disusun menurut cara-cara yang tradisional, melainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu;
2. Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinyu mengkaji hasil yang telah dicapai oleh organisasi, apabila perlu menyusun pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi;
3. Penggantian tenaga; dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga yang lain.<sup>8</sup>

Disamping peranan perundang-undangan atau lembaga, keberadaan aparat (baca manusia) yang menjalankan proses tersebut, merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan. Sikap dan perilaku aparat sebagai manusia baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya proses pemberian perlindungan kepada anak.

---

<sup>8</sup> Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, Alih Bahasa Suryatim, UI Press, Jakarta, 1985, hal.85.

Satu hal yang pasti, terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum tersebut bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri. Melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai, baik yang melekat dalam dirinya sebagai manusia, maupun nilai-nilai yang berasal dari luar dirinya. Kondisi demikian ini terjadi karena tiap-tiap orang didalam kehidupannya memiliki peran dan status ganda. Begitu juga aparat penegak hukum, oleh karenanya didalam perwujudan suatu tindakan dimungkinkan terjadi pertentangan diantara peran dan posisi yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pada masa penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan sebagai hasil kerja dari suatu sistem yang utuh dan terpadu<sup>10</sup>. Jadi dikarenakan sebagai sebuah sistem, maka di dalam Sistem Peradilan Pidana, juga dilihat ciri-ciri sebuah sistem yaitu :

1. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain tergantung (interdependence of its parts);
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts);
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setaiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts);

---

<sup>9</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1990, hal. 3.

<sup>10</sup> Lihat William A. Shade, *Organization and Management; Basic System Concept*, Rullin Book C, Malaysia, 1974, hal 115.

5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the cannot be understood if consider in isolation from the whole*);
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.<sup>11</sup>

Teori ini berkaitan erat dengan Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dimungkinkan untuk dapat melihat bekerjanya Sistem Peradilan Pidana yang khusus menangani anak-anak, sebagai sesuatu yang kompleks.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (law and order approach) dan pendekatan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “law enforcement”. Sedangkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem pertama kali dikenalkan oleh Frank Remington dalam Pilot Proyek tahun 1958, dan gagasan ini dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan dikenal dengan “Criminal Justice System”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Lihat Lili Rasyidi, et all, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal.43-44.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 7-8.

Menurut Muladi dalam Sistem Peradilan Pidana terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Dan sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi; serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystems of criminal justice system).<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah :<sup>14</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen pengadilan pidana.

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal .vii.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 9.

3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "the administration of justice".

Menurut Mardjono,<sup>15</sup> Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya lihat pendapat dari Packer tentang pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Menurut Herbert L. Packer ada dua pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu Crime Control Model dan Due Process Model. *Crime Control Model* didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Oleh Packer dikemukakan bahwa asas yang mendasari bekerjanya model ini adalah asas praduga bersalah (presumption of guilt). Dengan asas ini maka

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1994, hal. 84-85.

*Crime Control Model* menekankan penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan/paksaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

*Due Process Model* muncul sebagai reaksi terhadap *Crime Control Model*, dimana model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Berbeda dengan model pertama, model ini didasarkan pada praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai dasar nilai sistem peradilan. Dalam menghadapi suatu kasus, dituntut adanya proses penyediaan secara formal dan menemukan fakta secara objektif dan digelar secara terbuka di persidangan. Penilaian atas tuntutan penuntut umum baru akan dilakukan setelah terdakwa atau pengacaranya memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan bukti dan pembelaan atas tuduhan kepadanya.<sup>17</sup>

Dengan demikian *Crime Control Model* mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, sedangkan *Due Process Model* didasarkan pada aturan main yang telah ada. Dari apa yang telah dikemukakan di atas, terhadap pemahaman struktur organisasi sistem peradilan pidana yang diwujudkan oleh interaksi aparatnya, terlihat adanya saling ketergantungan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri.

---

<sup>16</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal.160.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 163.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan dilakukan oleh peneliti dalam situasi yang wajar<sup>18</sup> Pemilihan metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada tiga pertimbangan yang mendasar yaitu : menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>19</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan realisasi dari pemberian perlindungan hukum atas hak-hak anak yang dirampas kemerdekaannya. Baik melalui putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana badan terhadap anak maupun penahanan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Dilatar belakangi, bahwa :

- a. Hak-hak yang harus dilindungi dari anak, secara yuridis dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah tanggung jawab komponen-komponen dari peradilan pidana, yang tugas dan tanggung jawabnya diatur oleh peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>18</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 5.

<sup>19</sup> Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996, hal 5.

- c. Efektif tidaknya perlindungan hak-hak anak yang dirampas kemerdekaannya, secara nyata baru dapat dilihat di dalam praktek penerapan perlindungan hukum.

Dengan demikian dua hal mendasar yang tidak mungkin luput dari penelitian ini, adalah

- a. Subtansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak dan mekanisme bekerjanya Sistem peradilan Pidana; dan
- b. Kenyataan pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di atas.

Dua hal mendasar di atas menempatkan penelitian ini pada perpaduan dari dua jenis penelitian yang berbeda, yaitu penelitian hukum yang bersifat dokrinal<sup>20</sup> dan penelitian hukum yang bersifat empiris<sup>21</sup>. Bertolak dari sifat penelitian di atas, maka metode pendekatan yang diterapkan, adalah :

#### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah subtansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep perlindungan hukum terhadap anak; dan

#### 2. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah segi-segi sosial dari peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak anak.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hal. 9. Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan V, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, II, **Ibid**, hal. 14,. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, I, **Ibid**, hal. 10. Lihat juga Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, hal. 52. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)**, Penataran Metodologi Penelitian Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tanggal 11-15 Desember 1995, hal. 1.



Kedua bentuk pendekatan tersebut dipergunakan untuk melihat ruang lingkup permasalahan yang dibahas, yaitu dalam perlindungan hukum bagi anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan dalam sebuah proses bekerjanya sistem peradilan pidana. Di mana di dalam sistem tersebut terdapat komponen-komponen yang menentukan arah dan tujuan dari sistem itu sendiri. Dengan demikian, dalam pembahasan juga dilakukan dengan mempergunakan pendekatan :

1. Pendekatan Nilai, yang ditujukan untuk melihat eksistensi nilai-nilai sosial-budaya, sosial filosofik, dan sosial politik di dalam pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.<sup>22</sup>
2. Pendekatan Humanistik, yaitu sisi-sisi kemanusiaan yang mempengaruhi aparat (lembaga) peradilan dalam memberikan perlindungan pada anak.
3. Pendekatan Sistemik, yang ditujukan untuk melihat mekanisme bekerjanya perlindungan anak.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Tengah, yang diwakili oleh wilayah Kota Semarang dengan asumsi bahwa tingginya kriminalitas yang melibatkan anak, serta Kabupaten Kendal dan Kabupaten Purworejo dengan asumsi bahwa di kota ini terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak; sementara itu perlindungan hukum terhadap anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan kurang mendapatkan perhatian.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.31

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bertolak dari substansi perundang-undangan yang mengatur konsep perlindungan hukum terhadap anak-anak. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.<sup>23</sup> Data primer, data dasar (primary data atau basic data) diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berujud laporan harian dan seterusnya.<sup>24</sup> Namun demikian penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang dan dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dirampas kemerdekaannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara :

#### a. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Antara lain dokumen-dokumen, peraturan perundang-

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, I, *Op.Cit*, hal. 10.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 12. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal.12.

undangan, hasil-hasil karya ilmiah, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang ditahan dan dikenai pidana perampasan kemerdekaan.

b. Studi Lapangan :

Studi lapangan adalah cara memperoleh data primer dalam hal ini akan diusahakan tanya jawab (wawancara). Jenis wawancara yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara tak berstruktur,<sup>25</sup> dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang ditahan dan dipidana,

Wawancara dilakukan baik secara formal (dalam situasi kedinasan melalui prosedur perijinan) maupun informal (dalam suasana tidak dinas). Baik secara formal maupun informal wawancara dilakukan secara mendalam (depth interview)<sup>26</sup> dengan tujuan untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan dengan sungguh-sungguh.

## 5. Sampel dan Teknik Sampel

Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive rasional (logical purposive sampling).<sup>27</sup> Berdasarkan metode ini, nantinya dipilih informan yang benar-benar mengetahui dan memahami situasi sosial yang menjadi permasalahan

<sup>25</sup> Lihat Sanafiah Faisal, Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, akan tetapi peneliti mempunyai cadangan masalah yang dimunculkan secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara. Sanafiah Faisal, **Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi**, Yayasan A3, Malang, 1990, hal. 62.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, I **Op.Cit**, hal. 61.

<sup>27</sup> Sanafiah Faisal, **Op.Cit**, hal. 20.

dari objek yang diteliti. Sampel yang akan diambil sebagai informan ini terdiri dari :

- a. Sampel yang diambil dari kalangan hukum, yakni aparat yang pernah menangani kasus anak, dengan asumsi bahwa responden dianggap memahami permasalahan yang ada yaitu : penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan. Apabila peneliti menganggap bahwa variasi informasi yang didapatkan dari sampel tersebut belum cukup, pemilihan sampel lanjutan akan dilakukan untuk mendapatkan variasi informasi yang mungkin ada.

- b. Sampel yang diambil dari kalangan non hukum, yaitu anak pelaku.

Semua sampel yang dipergunakan tersebut merupakan sasaran yang dituju dalam mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Sampel tersebut akan “bergulir-menggelinding” laksana bola salju (snow balls) dan pilihan sampel berakhir setelah ada indikasi tidak adanya informan baru.<sup>28</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Dasar pembenaran analisis data ini adalah bahwa penelitian ini tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga diungkapkan realitas yang ada dibalik kebijakan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

---

<sup>28</sup> Sanafiah Faisal, Ibid, hal. 44.

Data yang telah diseleksi dibuat dalam suatu daftar dalam bentuk ringkasan, untuk dapat digabungkan sehingga tersusun dalam bentuk kata-kata yang sistematis. Sebagai kegiatan terakhir peneliti melakukan pemeriksaan ulang untuk dapat melakukan penyimpulan-penyimpulan melalui suatu penuturan deskripsi tentang apa yang berhasil dimengerti dari masalah penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam analisi data di atas adalah induksi konseptualisasi<sup>29</sup>, dimana peneliti berusaha menarik data atau informasi empirik ke tingkat abstraksi yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis domein, taksonomi, komponensial dan tema kultural<sup>30</sup> sebagai berikut :

- a. Analisis Domein dipergunakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran dan atau pengertian yang bersifat menyeluruh dari perlindungan hukum bagi anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Analisis Taksonomi ini dipergunakan dengan maksud untuk melihat perilaku aparat dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan melalui interaksi yang dipolakan dalam perlindungan anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
- c. Analisis Komponensial dipergunakan dengan maksud untuk melihat pola-pola serta proses interaksi yang timbul dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.

UPT-PUSTAK-UNDIP

<sup>29</sup> Sanafiah Faisal, *Ibid*, hal. 90.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 90-140.

- d. Analisis Tema Kultural dipergunakan untuk menarik hubungan (benang merah) antara faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan.

Dari deskripsi data dan analisis yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang sesuai, maka dapat ditunjukkan seberapa jauh perlindungan hukum terhadap anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan telah dilaksanakan atas dasar filosofis demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disini dibagi menjadi empat bab. Setelah **Bab Pertama** yang merupakan Pendahuluan ini, maka selanjutnya dalam **Bab Kedua** merupakan Tinjauan Pustaka tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam tesis ini. Penjelasan tentang perlindungan hukum terhadap anak ini meliputi, Pengertian Anak dan Batas Usia Pertanggungjawaban, Pengertian Kenakalan Anak, Pengertian Penahanan dan Pidana Perampasan, Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Anak, Lembaga yang Berkaitan dengan Upaya Perlindungan Anak.

**Bab Ketiga**, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan atas permasalahan yang diteliti. Terdapat tiga bahasan yaitu, pertama mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Masalah Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan dikaitkan dengan Standar Internasional, kedua Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum tersebut dilihat

dari Aspek Hukum, Lembaga, Aparat serta Anak dan ketiga tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Masalah Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan.

**Bab Keempat**, merupakan Penutup yang memuat Kesimpulan serta Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak dan Batas Usia Pertanggungjawaban Anak

Istilah anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil karena keadaannya<sup>31</sup>. Lain halnya dengan peristilahan hukum dalam praktek yang mengartikan anak sebagai turunan yang kedua<sup>32</sup>. Untuk selanjutnya pengertian tentang anak dapat dilihat dalam hukum yang tertulis maupun dalam hukum yang tidak tertulis. Hal ini perlu ditegaskan, karena ternyata dalam berbagai peraturan yang ada batas usia tentang anak berbeda-beda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 disebutkan bahwa :

ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali :

- anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
- pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419)

ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

ayat 3 : menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

---

<sup>31</sup> WJS Poerwadarminto, Op.Cit.hal.38.

<sup>32</sup> Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985, hal. 16.



Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jelas sekali menggariskan batas umur seorang anak adalah tidak lebih dari umur 21 tahun. Seandainya sebelum umur 21 tahun telah kawin maka dia dianggap telah dewasa dan pembubaran perkawinannya tidak menyebabkan kembali menjadi seorang anak lagi.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus kapan seseorang itu digolongkan sebagai anak. Hal ini tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Menurut Mr.R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi : <sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 19. Bandingkan dengan Hukum adat, terutama sepanjang berkaitan dengan unsur bersifat melawan hukum. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal.153.

1. dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dengan demikian dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia melainkan pada ciri tertentu yang nyata.

Pengaturan batas kedewasaan dalamYurisprudensipun tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No.53 K/Sip/1952 tanggal 5 Juni 1955, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali, dan dalam putusan MA No. 601 K/Sip/1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa "Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin". Penegasan ini diuraikan lagi dalam penjelasannya bahwa batas usia dewasa 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/JA/4/1989 meminta agar terhadap anak yang belum berusia 18 tahun diperlakukan tata tertib sidang anak.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikatakan bahwa :

*" For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years unles, under the law applicable to the child; majority is attained earlier"*

(yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).<sup>34</sup> Dengan demikian batasan usia dewasa menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah 18 tahun dengan pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.

Lain halnya dengan Beijing Rules yang menyebutkan tentang usia pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana yaitu :

*"In those legal systems recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity"* (Dalam sistem hukum yang mengakui konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk anak pelaku tindak pidana, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah, dengan menyangkut faktor kematangan emosi anak, mental dan intelektualitas anak).<sup>35</sup> Beijing Rules ini memberikan kebebasan bagi tiap-tiap negara untuk menentukan sendiri batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan, namun harus melihat kenyataan emosional dari si anak, mental dan pikirannya tersebut.

Usia minimum pertanggungjawaban kriminal berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban kriminal; artinya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikir dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung

<sup>34</sup> *Convention on The Rights of The Child*, Resolusi PBB No. 44/25, United Nations Children's Fund, 1989, hal. 6. Lihat juga *Human Rights, A Compilation of International Instruments*, Volume I (first Part), United Nations, New York, 1993

<sup>35</sup> *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rule)*, United Nation Departemen of Public Information, New York, 1986, hal. 4.

jawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban kriminal ditetapkan terlalu rendah atau jika tidak ada batas usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya, terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab sosial lain (seperti status perkawinan, kedewasaan berkewarganegaraan dan lain-lain).<sup>36</sup>

Dalam Peraturan PBB lainnya yaitu United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty disebutkan bahwa : A juvenile is every person under the age of 18. The age limit below which it should not be permitted to deprive a child of his or her liberty should be determined by law; (Seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh undang-undang).<sup>37</sup> Jadi terhadap seorang anak yang umurnya kurang dari 18 tahun sebetulnya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 45 dikatakan bahwa : Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan:

*Memerintahkan yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah*

<sup>36</sup> Lihat penjelasan Beijing Rule, Op.Cit, hal 4.

<sup>37</sup> Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, United Nation Resolution 45/113, New York, 1990, hal. 2.

*tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.*

Dengan demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur tentang batasan umur seorang anak mulai dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai kepastian tentang hal ini tidak disebutkan dalam pasal 45 tersebut. Semuanya diserahkan kepada keyakinan hakim.<sup>38</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia anak, akan tetapi dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang “anak yang belum mencapai usia 17 tahun” untuk menghadiri sidang. Sedangkan Pasal 171 a menentukan bahwa anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah.

Lain halnya dengan Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut Konsep) pada Pasal 96 disebutkan bahwa :<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Lihat Sianturi, *Op.Cit.* hal 157, yang mengemukakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh KUHP (yang berlaku sekarang ini) adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak (berusia 1 hari sampai dengan 16 tahun), asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut.

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, 1993, hal. 49, disebutkan bahwa batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang telah melakukan tindak pidana ini ditentukan berdasarkan bermacam-macam pertimbangan psikologis seperti kematangan emosional, intelektual dan mental. Lihat juga Penjelasan Naskah RUU KUHP 2000 Pasal 106, Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan intelektual dan mental anak. Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan lainnya. Batas usia maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

- (1) Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan dalam Sub-sub ini berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana antara umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Adanya batasan umur 12 –18 tahun bagi pelaku tindak pidana anak ini, memberi konsekuensi bahwa untuk seorang anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kemajuan tersendiri dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian menurut konsep yang menjadi subjek hukum adalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Menurut Rupert Cross, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 14 tahun; seorang remaja adalah setiap orang yang berumur 14 tahun tetapi belum mencapai umur 17 tahun (*a child is any person under the age of fourteen years; a young person is any person who has attained the age of fourteen years but has not attained the age of seventeen years*).<sup>40</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 4 menyebutkan bahwa : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Melihat batasan usia terhadap seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut tidak ada keseragaman.

<sup>40</sup> Rupert Cross & P. Asterley Jones, *An Introduction To Criminal Law*, Butterworth, London, 1953, hal. 129.

Hal ini tergantung dari masing-masing negara dalam melihat kematangan intelektual dan emosi seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Beijing Rules, bahwa batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya diserahkan kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan keadaan emosional, mental dan pikirannya. Konsep telah mengacu pada Beijing Rules dan Konvensi Hak-Hak Anak dalam menentukan batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **B. Pengertian Kenakalan Anak**

Seperti diketahui bahwa kejahatan merupakan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan anti sosial yang oleh negara dipidana. Dilihat dari hukum pidana bahwa suatu kejahatan harus mengandung unsur ada perbuatan manusia, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum dan harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat artinya orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan dan yang bersangkutan harus mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh hukum positif.

Pada awalnya kejahatan dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga, kemudian konsep ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja misalnya pengkhianatan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Munculnya mashab klasik sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan keadilan serta kesewenang-wenangan penguasa waktu itu, mendefinisikan kejahatan sebagai

perbuatan yang melanggar undang-undang. Hal inilah yang terpenting dalam mendorong munculnya doktrin "nullum crimen sine lege".<sup>41</sup>

Perkembangan selanjutnya tentang konsep kejahatan dikemukakan oleh C. Lombroso, yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam.

Kemudian oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain. Sedangkan George C. Vold mengatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya bahwa kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.<sup>42</sup>

Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial<sup>43</sup>

Mengenai istilah kejahatan ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek sosiologis, aspek yuridis dan aspek psikologis yaitu :<sup>44</sup>

#### 1. Kejahatan dari aspek sosiologis

<sup>41</sup> I.S. Soesanto, *Kriminologi*, BP. UNDIP. Semarang, 1995, hal. 14.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>43</sup> Benedict S. Alper, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, BP-UNDIP, Semarang, 1996, hal 11.

<sup>44</sup> A. Qirom Syamsudin, *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 5-7.



- a. R. Soesilo mengatakan : kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undangan, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.
- b. P. Mudikno Moeliono mengatakan : Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.
- c. W.A. Bonger : kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan).

## 2. Kejahatan dari segi yuridis

- a. R. Soesilo mengatakan : Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
- b. Moeljatno, dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 mengatakan : perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.

- c. Roeslan Saleh mengatakan : perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>45</sup>

### 3. Kejahatan dari segi psikologis

Secara psikologi kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penekanan kejahatan dilihat dari sosiologis ini pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada sifat hakekat dari perbuatan immoril yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat, di mana masyarakat dirugikan. Sedangkan dari sisi yuridis, kejahatan adalah yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi rumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat.

Selain itu kejahatan dapat dibedakan dalam 3 pengertian yaitu :<sup>46</sup>

#### 1. Pengertian Praktis

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi baik berupa hukuman, cemohan, atau pengucilan.

#### 2. Pengertian Religius

Kejahatan adalah identik dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa si yang berdosa.

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Pebuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, hal. 3.

<sup>46</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta, 1973, hal. 1-3.

### 3. Pengertian Yuridis

Kejahatan adalah delik hukum sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang.

Menurut MvT (Memorie van Toelichting) :

Kejahatan adalah delik hukum yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang dilarang.

Menurut Utrecht sebagai kutipan dari tulisan Simons dan Van Hamel :

Kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Berbeda dengan definisi kriminologi tentang kejahatan dari Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology*, yaitu kejahatan merupakan suatu gejala sosial.<sup>47</sup> Sedangkan Cross and Jones mendefinisikan kejahatan sebagai "*a crime is a legal wrong the remedy for which is the punishment of the offender at the instance of the state*"<sup>48</sup> Jadi kejahatan disini sebagai suatu pelanggaran atas hukum pidana yang diikuti dengan penghukuman yang dilakukan oleh negara.

<sup>47</sup> Sebagai gejala sosial maka yang diperhatikan ialah manusia pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Atau dengan kata lain ia memperhatikan "penjahatnya". Kalau hukum pidana memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan kemudian menghukum si penjahat. Tindakan yang tegas itulah tak terdapat dalam kriminologi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa kriminologi tak mempunyai perhatian atas proses penghukuman itu. Sebab kriminologipun menciptakan suatu masyarakat yang aman dan tenteram. Gerson W. Bawengan, *Ibid*, hal 5.

<sup>48</sup> Cross and Jones dalam Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 24.

Selain itu dalam kriminologi juga telah berkembang tiga macam pengertian kejahatan yaitu :<sup>49</sup>

- a. Pengertian yuridis : kejahatan adalah tingkah laku yang diharuskan atau dilarang oleh undang-undnag, yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana;
- b. Pengertian sosiologis : kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan yang menimbulkan reaksi dari masyarakat;
- c. Pengertian kriminologi baru : kejahatan adalah tingkah laku yang menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang atau sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebaikan dan kelemahan.

Istilah kenakalan anak/remaja di Amerika dikenal dengan kata "juvenile deliquent". Mengenai masalah ini Lembaga Pengadilan Amerika merumuskannya sebagai berikut : *"juvenile deliquent is most jurisdiction is technically speaking a child or young person (in most state under 16, 17, 18; in two state under 21) who has committed an offense for which he may referred to juvenile court authorities"*<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa anak yang berusia di bawah 21 tahun termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak.

Kata "delinquency" sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "deliquere" yang artinya "mengingkari", dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola tingkah laku yang telah diterima

<sup>49</sup> Koesriani Siswosoebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Kriminologi (Beberapa Pokok Pikiran Sebagai Landasan Untuk Bahan Diskusi)*, Majalah Hukum Trisakti, No, 23/Tahun XXI/Juli, 1996.

<sup>50</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hal.287.

di suatu masyarakat.<sup>51</sup> Sedangkan delinquency merupakan hasil perbuatan dari deliquent.

Istilah kenakalan (deliquent) adalah istilah suatu istilah kriminologi yang menyangkut persoalan-persoalan hukum. Istilah Juvenile Deliquent di Indonesia diartikan sebagai kenakalan anak/remaja, yaitu sebagai pengkondisian tingkah laku kriminal sebagai akibat pengaruh sosial dan kultural yang mengelilinginya, hal ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian tingkah laku anak terhadap norma-norma yang ada.

Batasan pengertian juvenile delikueni disatu pihak diartikan hanya perbuatan yang bersifat jahat yang dilakukan oleh kalangan remaja, sedangkan dilain pihak meliputi pengertian terhadap perbuatan yang bersifat kenakalan (non kriminil) dan perbuatan yang bersifat jahat (kriminil) yang dilakukan oleh kalangan remaja.<sup>52</sup>

Berdasarkan perspektif sosiologis, menurut Bynum dan Thomson kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :<sup>53</sup>

- a. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak;

<sup>51</sup> Rusli Efendy & A.S. Alam, *Langkah-Langkah Konkrit Untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Seminar Kriminologi III, Semarang 26-27 Oktober 1976.

<sup>52</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 43.

<sup>53</sup> Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dalam kutipan Purnianti, I, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jakarta 5-6 Agustus 1998, hal 3. Lihat juga Purnianti, II, *Kenakalan Remaja di Perkotaan*, Seminar Kriminologi IV, National Trends in Crime, FH UNDIP, Semarang 16-18 September 1991, hal 4. Disunting oleh Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, hal.33.

- b. Definisi Peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan;
- c. Definisi Masyarakat, bahwa perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.

Ketiga kategori definisi di atas adalah mencerminkan perbedaan terhadap kenakalan anak. Namun demikian ketiganya tidaklah disusun secara lengkap dan tuntas (*mutually exclusive*). Ketiga kategori definisi diatas adalah mencerminkan perbedaan pendekatan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya, terutama terletak pada penekanan; dan mengingat masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, maka ketiga definisi tersebut harus diperlakukan sebagai tiga dimensi pengertian yang terdapat dalam konsep pengertian anak. Hal ini penting jika ingin dicapai suatu definisi yang lengkap mengenai gejala sosial yang kompleks ini. Dengan demikian, konsep kenakalan anak adalah merujuk kepada sejumlah tindakan anak yang tidak sah secara hukum, yang menempatkan anak dalam peranan nakal, serta yang dipandang masyarakat sebagai penyimpangan.<sup>54</sup>

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan anak nakal ialah :<sup>55</sup>

- a. yang melakukan tindak pidana;
- b. yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/wali/pengasuh;
- c. yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;

<sup>54</sup> Ibid, hal 4.

<sup>55</sup> Soedarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Lokakarya Tentang Peradilan Anak, Semarang 8 — 10 Agustus, 1977, hal. 83.

- d. yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
- e. yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
- f. yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor;
- g. yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak itu.

Adanya definisi ini, maka dengan demikian yang dimaksud dengan anak nakal adalah yang memenuhi salah satu dari ketujuh rumusan diatas.

Pada umumnya delinquency merupakan produk dari konstitusi efektif dari mental dan emosi-emosi; yaitu mental dan emosi anak muda yang belum matang, yang labil dan jadi rusak/defektif, sebagai akibat proses pengkondisian oleh lingkungan yang buruk.<sup>56</sup> Untuk itu dapat dikatakan bahwa pilihan seseorang untuk menghargai atau menyetujui perilaku jahat; melalui proses belajar pada lingkungan jahat yaitu : sering, lama, mesra dan prioritas pergaulan.<sup>57</sup> Berbicara mengenai anak delikuen, sering dikaitkan dengan perilaku anak dalam kadar tertentu yang menyimpang. Pembicaraan ini biasanya akan membawa orang pada perilaku kriminal, beserta latar belakangnya termasuk usaha-usaha penanggulangannya.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan).<sup>58</sup> Namun dengan tegas bisa dinyatakan, bahwa tingkah laku

<sup>56</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 227.

<sup>57</sup> Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime*, disadur oleh Sudjono, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hal. 63.

<sup>58</sup> Bandingkan dengan pendapat Lombroso yang berpendapat bahwa "anak sebagai penjahat sejak lahirnya" ..... bahwa benih-benih dari penyakit tak bermoral dan sifat jahat bukanlah merupakan suatu pengecualian, akan tetapi secara umum telah nampak pada tahun-tahun pertama kehidupan

kriminil dari orang tua atau salah satu anggota keluarga itu memberikan pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya.<sup>59</sup>

Untuk menghadapi anak yang mempunyai tingkah laku kriminil ini harus dilakukan dengan pemahaman dan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pendidikan sesuai dengan sifat-sifat anak yang khusus. Dengan kata lain pemahaman dan pendekatan secara manusiawi sangat dibutuhkan oleh anak, dengan pertimbangan:<sup>60</sup>

1. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan/humaniter terhadap pribadi anak-anak dan remaja;
2. Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal, bermasalah dan menjadi masalah sosial, disebabkan oleh ketidakdewasaan mereka;
3. Untuk menggolongkan anak-anak dan remaja delikuen tersebut ke dalam satu kategori yang berbeda dengan kategori kriminalitas orang dewasa;
4. Untuk menerapkan prosedur-prosedur peradilan, penghukuman, penyembuhan, dan rehabilitasi khusus, terutama sekali untuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan-tindakan manipulatif oleh orang-orang dewasa;

---

manusia, seperti halnya orang menemukan secara teratur pada embrio bentuk-bentuk yang tertentu, yang pada orang dewasa akan dianggap sebagai cacat, begitulah anak sebagai seorang manusia yang tak ada perasaan moral, adalah apa yang oleh ahli-ahli penyakit jiwa dinamakan menderita penyakit tak bermoral, tapi oleh kita dinamakan "penjahat sejak lahirnya". W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1962, hal. 82.

<sup>59</sup> Kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi instinktif; juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat, W.A. Bonger, *Ibid*, hal. 224, 227.

<sup>60</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.25



5. Adanya tugas parent patriae sebagai orang tua dan bapak oleh orang dewasa dan masyarakat, khususnya oleh negara untuk ikut bertanggungjawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-anak dan remaja yang terhalang proses perkembangan mental, dan cacat secara sosial.

### C. Pengertian Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan

Jika seseorang ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, berarti ia akan kehilangan hak-hak untuk melakukan segala aktifitasnya. Namun bagi orang yang berkonflik dengan hukum karena suatu hal harus ditahan, maka kebebasannya akan menjadi terbatas sampai proses peradilan tersebut selesai. Bahkan untuk orang yang harus dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka ia akan terkekang kebebasannya sampai selesai menjalani masa hukumannya tersebut.

Hal ini akan menarik, jika yang ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan tersebut adalah anak-anak. Subyek yang khusus inilah yang menjadi perhatian kita. Sebagai pelaku tindak pidana, anak-anak berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 3 / 1997, mungkin saja ditahan oleh penyidik dan selanjutnya oleh hakim dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.<sup>61</sup>

Penahanan itu sendiri sesuai Pasal 22 dapat berupa :

- a. Ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang meliputi :

<sup>61</sup> Pasal 1 butir 21, KUHAP No. 8/1982. Dalam penulisan tesis ini KUHAP yang dipergunakan adalah yang dihimpun dan diterbitkan oleh Aneka Ilmu, Semarang, 1989.

1. Lembaga Pemasyarakatan;
  2. Kantor Polisi;
  3. Kantor Kejaksaan;
  4. Lain-lain.
- b. Tahanan Rumah;
- c. Tahanan Kota.

Untuk dapat melaksanakan penahanan, maka haruslah dipenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari penahanan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Untuk itu harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan dari penyidik, atau penuntut umum atau hakim. Sedangkan syarat materiilnya sesuai dengan pasal 21 KUHP yaitu tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana tertentu.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Tindak pidana tertentu tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506 KUHP, Pasal 26 dan Pasal 26 Rechterordonnantie (Ordonansi Bea dan Cukai), terakhir diubah dengan Staatsblad 1931 No.471, Pasal 1 dan 2 Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 (7), 41, 42, 43, 47, dan 48 Tindak Pidana Narkotika.

Selain itu ketentuan tentang penahanan juga terdapat dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang No. 3/1997 yaitu :

Pasal 44 :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan. Maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45 :

- (1) Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46 :

- (1) Untuk kepentingan penuntut, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47 :

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48 :

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49 :

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50 :

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

Dengan demikian masa penahanan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dibatasi secara limitatif oleh undang-undang. Oleh karena itu petugas yang melakukan penahanan tidak

dapat secara sewenang-wenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Penahanan bagi anak merupakan kontaminasi kriminal yang berbahaya, jika penggunaannya dilakukan secara gegabah, dan tanpa pertimbangan sebaik-baiknya kepentingan anak. Penggunaan asas penahanan sebagai last resort untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak terpengaruh lebih besar dengan stigmatisasi lembaga koreksi ini demi menjamin hak-hak anak tersebut.<sup>63</sup>

Seseorang yang dihukum pasti akan merasa hak-haknya telah dirampas. Istilah hukuman itu sendiri berasal dari kata "straf" yang mempunyai arti sangat luas. Untuk lebih mengkhususkan lagi dipergunakan istilah pidana, untuk mengkonotasikan hukuman yang berarti pidana perampasan kemerdekaan.<sup>64</sup>

Menurut pendapat Karni, bahwa hukuman itu suatu sengsara (mara atau nestapa) yang kita harus merasai oleh karena kita melakukan perbuatan atau

UPT-PUSTAKA-UNDIP

<sup>63</sup> Edy Ikhsan, *Orientasi Non Humanistik dan Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Beberapa Catatan Lapangan, Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

<sup>64</sup> Prof. Soedarto menyamakan arti pidana perampasan kemerdekaan sama dengan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana pemsarakatan, setidaknya-tidaknya ada pembatasan kemerdekaan. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, 21 Desember 1974. Lihat juga dalam Soekotjo Hardiwinito, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal. 7.

menimbulkan peristiwa yang dilarang dan diancam oleh hukuman.<sup>65</sup> Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>66</sup>

Hukum pidana itu adalah hukum sanksi, dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan undang-undang. Terhadap orang yang memperkosa ketentuan hukum diambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang bersangkutan.<sup>67</sup> Yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>68</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis-jenis pidana yaitu (Pasal 10) :

Pidana Pokok :

Pidana mati;

1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda;
4. Pidana Tutupan.

Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

<sup>65</sup> Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Jambatan, Surabaya, 1950, hal. 9.

<sup>66</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 109-110.

<sup>67</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, hal. 115.

<sup>68</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1964, hal. 26.

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Yang menjadi persoalan disini adalah jika yang dijatuhkan pidana adalah seorang anak. Sebelum adanya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, maka peraturan yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan pengecualian hukuman mati. Adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ini, maka hukuman yang dikenakan adalah yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan (Pasal 22). Sedangkan jenis pidana yang dapat dikenakan pada anak nakal yaitu (Pasal 23) :

Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan pada anak nakal :

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Kurungan;
3. Pidana denda; atau
4. Pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal adalah :

1. Perampasan barang-barang tertentu;
2. Pembayaran ganti rugi.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak nakal, maka terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal yaitu (Pasal 24) :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;



2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dengan demikian yang termasuk pidana perampasan kemerdekaan dan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah hanya pidana penjara dan pidana kurungan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.<sup>69</sup>

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat).<sup>70</sup>

Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Namun demikian tujuan dari pidana penjara ini semata-mata

<sup>69</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 83.

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 179.

tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan memberikan penderitaan kepada terpidana dengan dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Tetapi di samping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali ke masyarakat.

Ada tiga sistem hukuman penjara yaitu : yang menhendaki para hukuman terus menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel (sistem Pennsylvania), bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja, tetapi tidak boleh bicara (sistem Auburne), dan yang menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat (sistem Irlandia).<sup>71</sup>

Sehubungan dengan tujuan pembedaan ini, Soedarto memberikan rumusannya yaitu :<sup>72</sup>

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Usaha pengembangan hukum pidana dan pembedaan secara universal sudah dimulai sejak akhir abad 18 yang karena berbagai hambatan diupayakan

<sup>71</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 170.

<sup>72</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 58.

tahapan pola pemikiran tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap pidana.<sup>73</sup> Dalam pelaksanaan pidana penjara telah banyak ditemukan berbagai dampak negatif, oleh karena itu perlu diadakan modifikasi bentuk, batasan waktu pidana, tempat penyelenggaraan pidana, dan stelsel pengaturan/penerapan pidana.<sup>74</sup> Pemikiran baru untuk menghindari dampak negatif terhadap pidana penjara telah dikembangkan dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif<sup>75</sup> berdasarkan kemanusiaan dalam sistem Pancasila.

Pidana perampasan kemerdekaan lainnya adalah pidana kurungan yang pelaksanaannya juga dalam penjara. Berbeda dengan pidana penjara, seseorang yang dijatuhi pidana kurungan tidak bebas pergi ke mana saja menurut sekehendak hatinya. Jika dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan lebih ringan karena ancaman maksimum pidana kurungan jauh lebih pendek dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana penjara. Lamanya hukuman kurungan ini adalah 1 hari sampai satu tahun.

Ada beberapa perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu:<sup>76</sup>

1. Orang yang dijatuhi pidana penjara dapat dipindahkan kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan mereka yang dijatuhi pidana kurungan harus menjalani kurungannya di dalam daerah di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman, di dalam daerah di mana ia berada;

<sup>73</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 13, 20, 21.

<sup>74</sup> Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 21.

<sup>75</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 53.

<sup>76</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 71.

2. Mereka yang dijatuhi pidana penjara pekerjaannya lebih berat;
3. Mereka yang dijatuhi pidana kurungan dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Inilah yang lazim disebut pistole. Terhukum dengan pidana kurungan jika menghendaki boleh mengadakan makanan dan tempat tidur sendiri, dan boleh pula membeli segala sesuatu yang kiranya dapat meringankan beban hidupnya dengan biaya sendiri.

Pidana perampasan kemerdekaan baik yang berupa pidana penjara maupun pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak nakal lamanya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Apabila usia anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup belum mencapai usia 12 tahun maka terhadap anak nakal tersebut dikenakan tindakan untuk diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Namun terhadap perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup sedangkan anak belum berusia 12 tahun, maka terhadapnya dapat dikenakan salah satu tindakan yang tersebut dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan demikian, penjatuhan pidana pada anak-anak titik beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak dari penguasa untuk memberi nestapa, tetapi

adanya keinginan untuk memberi kesempatan yang baik pada anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan di luar lingkungan yang jahat atau yang tidak mengenal tata tertib.<sup>77</sup>

#### **D. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Anak adalah anugerah Tuhan yang merupakan amanat. Ia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua sejak ia dalam kandungan sampai dalam batas usia tertentu, sebagaimana anak juga merupakan salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapat pelayanan dan perlindungan.<sup>78</sup>

Pembangunan anak terdiri dari tiga kategori kegiatan utama yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan. Pembinaan anak berusaha untuk memberikan arah yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri si anak. Perlindungan anak lebih ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara sejahtera lahir batin, dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan

---

<sup>77</sup> Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 330.

<sup>78</sup> Quraish Shihab, *Perlindungan Anak Dalam Segi Agama*, Semiloka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak, Jakarta 12-13 Agustus 1998, hal 124.

demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>79</sup>

Pengertian konsep perlindungan anak yang telah dirumuskan dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diselenggarakan oleh Prayuwana sejak dua dasawarsa yang lalu, patutlah menjadi acuan. Seminar tersebut menghasilkan rumusan pengertian perlindungan anak, yaitu :<sup>80</sup>

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Konsep perlindungan anak yang telah dirumuskan tersebut paling tidak dapat dipergunakan untuk menyamakan persepsi tentang arti perlindungan anak.

Sikap dasar pemikiran perlindungan terhadap anak, didasarkan kepada kenyataan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bertanggungjawab, diperlukan pembinaan secara terus menerus

<sup>79</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 37.

<sup>80</sup> Purnianti, III, *Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak*, Semiloka Draf RUU Perlindungan Anak, FKPPAI, Jakarta : 12-13 Agustus 1998, hal. 104.

demikian kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Perlindungan terhadap anak pada hakekatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak tersebut sudah barang tentu dihadapkan kepada berbagai faktor kendala dan tantangan dalam masyarakat, seperti penyimpangan perilaku anak, perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.<sup>81</sup>

Perlindungan yang diperlukan bagi setiap anak dapat digolongkan menurut empat aspek kehidupan nasional yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam. Dalam aspek ekonomi tidak boleh ada 'child labour' yang dipaksa bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak. Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhannya menjadi manusia yang berkualitas. Dalam aspek politik atau hukum, tidak boleh ada aturan perundang-undangan yang tidak mengindahkan harkat dan martabat anak, dan dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak yang bermasalah, harus selalu diutamakan kepentingan pertumbuhan anak menjadi manusia yang baik. Dalam aspek hankam, anak juga harus dilindungi dari penyalahgunaan di dalam segala bentuk kejahatan.<sup>82</sup>

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

<sup>81</sup> Risalah Undang-Undang Pengadilan Anak, Buku II, Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 1997, hal. 975.

<sup>82</sup> K. Umar Wirahadikusumah, Sambutan Lokakarya Nasional Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Serta Pelaksanaannya Dalam Sistem Peradilan Anak, Jakarta, 12 Juni 1995.

Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>83</sup>

Untuk itu syarat-syarat pelaksanaan perlindungan anak yang harus dipenuhi agar efektif, rasional positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

1. Para partisan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat;
2. Harus dilakukan bersama;
3. Kerjasama dan koordinasi;
4. Perlu diteliti masalah yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen;
5. Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi;
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
7. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri;
8. Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis;
9. Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi;
10. Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

---

<sup>83</sup> Arief Gosita, *Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 12.

<sup>84</sup> Arif Gosita, *Ibid*, hal. 18.



Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek kehidupan nasional, bukan merupakan masalah yang sederhana melainkan sebaliknya, kompleksitas permasalahan yang melingkupinya menyebabkan dan menimbulkan persoalan perlindungan hukum terhadap anak pada posisi yang rumit. Hal ini juga ditandai dengan tidak sedikitnya (banyaknya) dokumen-dokumen yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak. Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang yaitu :

1. Perlindungan terhadap-hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial ekonomi;
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan, dan lain sebagainya;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata, dan;
8. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 156. Lihat juga Makalah *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, pada Seminar Nasional Peradilan Anak, FH-UNPAD, Bandung 5 Oktober 1996, hal 3.

Dengan demikian tanggung jawab perlindungan (hukum) terhadap anak-anak, tanpa terkecuali apakah anak tersebut berkonflik dengan hukum atau tidak, bukan hanya menjadi tanggungjawab orang tua atau lingkungan masyarakat tempat dimana si anak bersosialisasi dan berinteraksi, namun juga menjadi tanggung jawab negara. Ungkapan demikian hampir setiap saat kita jumpai dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, yaitu :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada bagian Menimbang : bahwa anak adalah penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, yaitu bahwa anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.
3. Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Rights of The Child yaitu anak merupakan potensi dasar sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangan dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak ini, secara implisit menempatkan persoalan yang berkaitan dengan anak bukan saja merupakan tanggung jawab nasional saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dunia internasional. Sehubungan dengan tanggung jawab masing-masing negara di dalam konvensi tersebut, pada Pasal 2 ayat (10) dirumuskan “negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa pandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah”

Berkaitan dengan tindakan atau kebijaksanaan yang diambil oleh negara-negara peserta konvensi anak tersebut, Pasal 4 dari Konvensi tersebut merumuskan :

“negara-negara peserta akan mengambil langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang ini. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam rangka kerja sama internasional”.

Bertolak dari pandangan tersebut diatas, persoalan perlindungan hukum bagi anak dalam masalah penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan, akan dibahas dalam ruang lingkup proses peradilan, baik mulai dari anak tersebut

diperiksa ditingkat penyidikan, ditahan, diadili, dipidana, sampai pada anak tersebut berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (dipenjara). Oleh karenanya, disamping perumusan hak-hak anak yang mengalami proses peradilan ini, secara yuridis haruslah dirumuskan dalam perundang-undangan, juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan hukum tersebut, seperti: Pertama, aparat (baca manusia) yang ditugaskan untuk penyidikan ataupun pemeriksaan terhadap anak pelanggar hukum, setidak-tidaknya mereka adalah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang psikologi (kejiwaan) anak. Ini dilatar belakangi, seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa tidak terhadap semua orang, anak ini mengutarakan perasaan hatinya. Kepolisian selaku penyidik terhadap semua tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa, walaupun saat ini posisinya telah lepas dari ABRI/TNI, namun pola penyidikan yang dijalankan dalam lembaga ini masih bersifat semi militer, keras dan kasar. Oleh karenanya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, seharusnya lembaga kepolisian ini melakukan penilaian yang lebih selektif terhadap aparat yang menangani kasus anak tersebut, agar tidak timbul rasa takut yang berlebihan ataupun traumatik efek pada diri si anak.

Terhadap hal ini Kartini Kartono, mengemukakan :

“..... Yang lebih penting lagi dalam menganalisis keberadaan seorang anak, adalah kemampuan memahami dan menginterpretasikan kehidupan psikis anak dilihat dari pribadi dan kepentingan anak sendiri. Sehingga dengan begitu tidak akan terjadi salah paham, tidak timbul relasi kortsluiting dengan anak

....., kesalahan yang paling banyak dalam menganalisa dan melihat keberadaan anak dari sudut pandang orang dewasa”.<sup>86</sup>

Untuk itu perlu diperhatikan dan dijaga dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yaitu :<sup>87</sup>

1. Menghindari sikap yang dapat menimbulkan kesan, bahwa pemeriksaan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan atau sengaja mencari-cari kesalahan;
2. Menjauhi sarana-sarana yang menunjukkan suasana formal, atau berusaha menciptakan suasana dialogis dan informal;
3. Menghindari ucapan istilah-istilah tegas, keras, dan kasar, seperti : membunuh, mencuri mengaku atau tidak;
4. Menimbulkan suasana yang tidak ada jarak secara struktural;
5. Tidak mondar-mandir dalam melakukan pemeriksaan;
6. Menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang sama antara pemeriksa dengan yang diperiksa;
7. Menggunakan bahasa yang ramah, mudah dipahami dan dimengerti;
8. Menghargai pribadi yang diperiksa;
9. Tidak langsung mencela orang yang diperiksa, pada saat pemeriksaan mengetahui kebohongan
10. Menjauhi pemakaian belenggu (borgol) selama pemeriksaan;
11. Pemeriksa harus dapat menempatkan diri didalam status orang yang diperiksa;

<sup>86</sup> Kartini, Kartono, *Op.Cit*, hal.12.

<sup>87</sup> G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hal.89-96.

## 12. Memandang orang yang diperiksa selaku manusia.

Kedua, didalam menempatkan anak dalam tahanan, atau dengan kata lain bila perampasan kemerdekaan sianak dilakukan, maka harus diperhatikan suasana dan prasarana yang ada ditempat dimana kemerdekaan anak itu dirampas. Ini bertujuan untuk menimbulkan suasana yang harmonis, dimana sianak tidak merasa bahwa dirinya ditahan, seperti ; tersedianya kebutuhan-kebutuhan yang secara umum dibutuhkan anak-anak.

Ketiga, didalam memproses anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana maka berdasarkan rumusan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 aparat-aparat yang terkait dalam peradilan diharuskan tidak memakai seragam, agar tidak timbul kesan rasa takut pada diri sianak.

Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak ini berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Right tahun 1948. Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB, mengesahkan Declaration of The Right of The Child (Deklarasi Hak-Hak Anak) yang terdiri dari 10 prinsip.<sup>88</sup> Deklarasi inilah sebagai cikal bakal lahirnya instrumen internasional lainnya yang khusus memberikan perlindungan kepada anak.

Berkaitan dengan keleluasaan hakim dalam memilih jenis sanksi pidana yang sesuai bagi anak, dapat diperhatikan prinsip-prinsip internasional seperti :<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 108.

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 164-166. Lihat Beijing Rule, *Op.Cit*, hal. 10.

1. The Standard Minimum Rules for The administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), antara lain tertuang dalam :

**Rule 17.1 :**

*The disposition of the competent authority shall be guided by the following principles* (pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim) harus berpedoman pada prinsip-prinsip) :

- a. *The reaction taken shall always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence but also to the circumstances and the needs of the juvenile as well as to the needs of the society* (reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot atau keseriusan tindak pidana tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat);
- b. *Restriction on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum* (pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi si anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin);
- c. *Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicatedd of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no other appropriate response* (perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius termasuk tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang lain atau terus menerus melakukan

tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respon/sanksi lain yang tepat);

- d. *The well-being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case* (kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak).

**Rule 17.4 :**

*The component authority shall have the power to discontinue the proceedings at the any time* (pejabat yang berwenang (maksudnya hakim) mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan).

2. Di dalam Resolusi PBB 45/113 tentang “UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty” antara lain dinyatakan :

1.1 Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya akhir (*“Imprisonment should be used as a last resort”*).

1.2 Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional. (*“Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exeptional cases”*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa adanya prinsip-prinsip internasional di atas memberikan pedoman bahwa penggunaan sarana custodial bagi anak haruslah hati-hati , yaitu terhadap tindak pidana yang luar biasa/eksepsional, dalam jangka waktu seminimal mungkin, dan harus sebagai upaya yang terakhir



jika dirasa tidak ada sanksi lain yang lebih tepat. Dengan demikian penggunaan sanksi pidana ini harus bersifat selektif dan alternatif.

Namun jika tidak disosialisasikan, maka meminjam istilah Dr. Maithille K. Pathak dari Pusat Hukum Anak-Anak dan Keluarga Universitas Nebraska-Lincoln dalam makalahnya di Konferensi Internasional AIDS untuk Asia Pasifik di Manila, Oktober 1997, hukum hak-hak asasi manusia Internasional yang khusus melindungi anak-anak hanya akan jadi janji kosong dan macan kertas alias ompong. Kita sudah kelewat banyak memiliki undang-undang dan peraturan yang bagus dalam perumusan tapi tidak ada apa-apanya dalam praktek, setidaknya hal ini jangan terulang untuk hal-hal yang menyangkut anak-anak. Mereka memang tidak sampai separuh dari seluruh jumlah penduduk negeri ini, tapi mereka adalah 100 % harapan bagi masa depan.<sup>90</sup>

#### **D. Lembaga yang Berkaitan dengan Upaya Perlindungan Anak**

##### **1. Kepolisian**

Konsideran Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : “Bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman

<sup>90</sup> Irwan Julianto, *Peran Media dan Perlindungan Anak*, Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta 12-13 Agustus 1998, hal 159.

masyarakat dalam sistem keamanan umum dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional". Adanya konsideran tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian adalah sebagai salah satu alat penegak hukum yang profesional.

Penegakan Hukum itu sendiri diartikan sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>91</sup>

Hal ini sesuai dengan fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. (Pasal 3)

Polisi di Indonesia dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 1961.<sup>92</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan menjamin tertib tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Pasal 2).

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal. 8.

<sup>92</sup> Dalam penulisan tesis ini Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang dipergunakan adalah yang dihimpun dan diterbitkan oleh Redaksi Sinar Grafika Jakarta, 1997.

Untuk lebih memahami peran dan tugas dari Polisi ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dilihat dari struktur organisasinya yaitu :

Pasal 9 :

- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Republik Indonesia dan menyelenggarakan pimpinan teknis Kepolisian, menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya.
- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
  - a. penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada :
  - a. ayat (2) huruf a bertanggung jawab pada Menteri;
  - b. ayat (2) huruf b bertanggung jawab pada Panglima.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh Panglima.

Pasal 10 :

- (1) Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.
- (2) Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selain struktur organisasi tersebut di atas, tugas dan wewenang dari Polisipun diatur yaitu :

Pasal 13 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;

- b. melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
  - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - g. membina ketaatan dari warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
  - i. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas;
  - j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka dalam Pasal 15 disebutkan wewenang dari

Polisi yaitu:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan pengaduan;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti;
  - e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
  - j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara;
  - l. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Selain wewenang yang terdapat pada Pasal 15, dalam bidang proses pidana,

Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain berpedoman pada ketentuan dari KUHAP, dalam penyidikan untuk perkara anak polisi juga menggunakan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Pasal 41). Sedangkan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Proses penyidikan ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hasil penyidikan terhadap perkara anak nakal tersebut wajib dirahasiakan. (Pasal 42)

## 2. Kejaksaan

Pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan pembangunan hukum ini, maka upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang tersebut. Salah satunya adalah kejaksaan, yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>93</sup>

Pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ini diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. (Pasal 2).

UPT-PUSTAK-ENTER

<sup>93</sup> Dalam penulisan tesis ini Undang-Undang Kejaksaan yang dipergunakan adalah yang dihimpun dan diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Untuk lebih memahami peran dan tugas dari kejaksaan, maka dapat dilihat dari struktur organisasinya yaitu : susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. (Pasal 5). Apabila dipandang perlu dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat maka dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri. Hal ini didasarkan atas pertimbangan perkembangan wilayah serta penambahan penduduk (Pasal 7).

Pasal 17 :

- (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
- (2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satuan unsur pimpinan.
- (4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 19 : Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Presiden.

Mengenai tugas dan wewenang dari kejaksaan diatur dalam :

Pasal 27 :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa hukum khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum., kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;



- c. pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 32 :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh presiden;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
- e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- g. mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

Selain itu mengenai kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu :

Pasal 53 :

- (1) Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Pasal 54)

### 3. Pengadilan

Konsiderans Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya

dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, merupakan terobosan yang maju untuk membedakan pengadilan anak dengan pengadilan pada umumnya.

Ensiklopedi Amerika menyebutkan bahwa peradilan anak adalah pusat dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar.<sup>94</sup> Menurut Prof. Soedarto, peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>95</sup> Jadi di sini ada dua aktifitas dalam sidang peradilan anak yaitu : aktifitas pemeriksaan dan aktifitas pemutusan perkara.

Salah satu pelaksanaan Illionis Act 1989, Chicago Bar Association telah merumuskan dasar pemikiran yang tidak berbeda dengan pemikiran kita, yaitu pada pokoknya bahwa peradilan anak harus diartikan dan berfungsi :<sup>96</sup>

1. Tidak sekedar memberikan keadilan, menghukum, memperlakukan seorang anak yang terperangkap dalam situasi dan kondisi kesulitan sedemikian rupa, telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (sebagai penjahat harus dihukum).
2. Peradilan Anak bukanlah semata-mata hanya untuk menempatkan adanya kesalahan dan menghukumnya, melainkan peradilan anak adalah sebagai alat negara yang berfungsi sebagai perlindungan anak, yang seharusnya pada

<sup>94</sup> Ensiklopedi Amerika, 1976, seri 6, dalam Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 6.

<sup>95</sup> Soedarto I, *Op.Cit.* hal. 80.

<sup>96</sup> Karlinah P.A. Soebroto, *Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Serta Pelaksanaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lokakarya Nasional, Jakarta, 12 Juni 1995, hal. 2.

prakteknya merupakan usaha bersama terhadap rehabilitasi moral, membentuk disiplin anak, merupakan sekolah maupun cabang pendidikan masyarakat bagi anak-anak termasuk orang tua yang lalai.

Untuk itu, pengadilan dibantu oleh lembaga resmi maupun swasta harus mampu bertindak dan berperan sebagaimana seharusnya diberikan oleh orang tua (berperan sebagai orang tua).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka untuk mencapai peradilan yang ideal harus menekankan pada empat komponen yaitu :<sup>97</sup>

**Pertama :** pemberian prosedur informal, yang belum ada sebelumnya pada setiap tahap pengambilan keputusan dan disposisi, maka anak-anak di dalam pengadilan harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena telah dirundingkan, obyeknya sama sekali berbeda, yaitu menentukan sebabnya bukan apa yang telah dilakukan. Hakim dibantu probation officer dari yayasan badan hukum sosial yang ditunjuk mengadakan pra dengar dan dengar pendapat dengan orang-orang yang terpilih, yang sekiranya dapat memberikan keterangan mengenai motivasi, kehidupan sosial, dan latar belakang anak tersebut.

**Kedua :** komponen besar yang kedua dari peradilan anak adalah adanya suatu pusat penahanan yang bersih, terpisah, digunakan untuk, sebelum, selama, atau sesudah dihadapkan ke pengadilan. Tujuan antara lain untuk menyediakan lingkungan yang sehat, dan mencegah mereka bercampur gaul dengan para penjahat dewasa, di dalam penjara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk meneliti secara sistematis ke dalam motivasi

---

<sup>97</sup> Encyclopedia of Crime Sanford H. Kadish, Vol. 3, dalam Karlinah P.A. Soebroto, Ibid, hal. 3. Lihat juga Inventarisasi Pelaksanaan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1992, Unit Kerja Hukum FK-PPAI, Jakarta, 1992, hal. 31-32.

dan kepribadian anak yang bersangkutan, untuk mengetahui bagaimana dan siapa dia selama ditahan, anak harus diperhatikan, untuk memisahkan aspek-aspek fisik dan mental anak yang dapat membantu pengadilan yang menanganinya, kelakuan anak di dalam tahanan dapat merupakan bagian dari penyidikan pra dengar pendapat.

**Ketiga :** Untuk memungkinkan pembuatan undang-undang yang memberikan dorongan kepada para hakim untuk menghukum, baik melalui denda atau tahanan penjara, orang tua/orang dewasa yang secara aktif memberikan kontribusi pada kenakalan anak. Hukuman bagi orang tua (orang dewasa) atas kelalaian dan kewajiban para orang tua yang lalai atau para orang tua yang bejat moral yang dapat mempengaruhi anak, juga agar pembuat undang-undang itu dirancang, baik sebagai efek simboliknya maupun sebagai pendorong peleburan komponen.

**Keempat :** komponen yang paling menonjol dari peradilan anak-anak adalah masa percobaannya, rehabilitasi anak di dalam rumahnya sendiri, di mana probation officer merupakan penghubung penanganan utama.

Untuk masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan anak mempunyai asas-asas yang membedakan dengan sidang pidana untuk orang dewasa yaitu :<sup>98</sup>

Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat 1).

---

<sup>98</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 15.

Orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun dan belum pernah kawin.

1. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat 2).

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.

2. Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat 5,6,dan 7).

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :

- a. Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;
- b. Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak;
- c. Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.

3. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11).

Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari :

- a. pembimbing kemasyarakatan;
- b. pekerja sosial; dan
- c. pekerja sosial sukarela.

4. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1).

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.

5. Keharusan splitsing (Pasal7).

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana

bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.

6. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1).

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

7. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18).

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat Pengadilan Negeri, banding, atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

8. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 – 49).

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHP.

9. Hukuman lebih ringan (Pasal 22-32).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 tahun.

Pemeriksaan di sidang pengadilan anak ini, wajib dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan saksi (Pasal 55). Dalam sidang pendahuluan, hakim anak membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa

didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 57).

Pada saat pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa ke luar sidang, sedangkan yang lainnya tetap hadir (Pasal 58). Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Putusan yang akan dijatuhkan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Walaupun sidangnya tertutup, namun untuk putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada anak wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 59).

#### **4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Kedudukan Balai Pemasyarakatan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah bidang Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kehakiman. Bapas ini mempunyai tugas : melaksanakan narapidana dan anak didik di luar lembaga pemasyarakatan. Dikaitkan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka tugas Bapas adalah mendidik narapidana dan anak didik. Jadi pada intinya tugas Bapas adalah memberikan bantuan atau konsultasi dalam proses peradilan kepada instansi pemerintah, terutama pengadilan anak berupa penyelidikan peri kehidupan seseorang dari segi ekonomi dan kejiwaan sebagai bahan tambahan guna penentuan pidana atau tindakan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bapas mempunyai fungsi sebagai berikut :



### 1. Sebelum sidang pengadilan

Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Nopember 1991 Nomor : M.03-UM.01.06 tahun 1991 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa : “untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, Hakim wajib menugaskan pembuatan penelitian kemasyarakatan anak tersebut kepada : Bapas di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak tersebut; atau apabila di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyidangkan anak tersebut tidak ada Bapas, maka hakim dapat menugaskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang terdekat atau Lembaga Pemasyarakatan setempat”. Jadi jelaslah bahwa anak pelaku tindak pidana sebelum disidangkan perkaranya harus dibuatkan Litmas terlebih dahulu. Litmas ini nantinya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya secara tepat, cepat dan adil. Oleh karena itu Litmas harus dibuat secara obyektif, berencana dan sistematis. Setiap tahap yang ditempuhnya dilakukan dengan pendekatan untuk mengetahui dan mendalami obyek atau klien tertentu dengan mencari data yang lengkap, yang mengungkapkan diri pribadinya, keluarga, maupun lingkungannya yang melatar belakangi dilakukannya kejahatan. Litmas tersebut tidak akan mempengaruhi dan mengurangi wewenang hakim, sebab tujuan dibuatnya Litmas ini adalah demi kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

## 2. Dalam Sidang Pengadilan

Bapas mengikuti sidang di pengadilan khususnya dalam perkara kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat Litmas wajib hadir, karena pada persidangan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan klien anak yang ditanganinya. Selain itu juga memberikan saran kepada hakim mengenai putusan yang tepat kepada klien anak tersebut. Mengingat Pembimbing Kemasyarakatan adalah orang yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang klien beserta segala permasalahannya, maka dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar bersikap obyektif dan harus dapat mempertanggungjawabkannya baik dari segi hukum maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan harus jeli, cepat tanggap, peka dan cepat dalam menganalisa suatu keadaan tertentu serta dapat membuat kesimpulan dan saran yang tepat. Dalam memberikan saran kepada hakim harus tetap memperhatikan kepentingan klien, hukum dan masyarakat.

## 3. Sesudah Sidang pengadilan

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa memasukkan klien anak ke dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara, dijadikan anak negara, maupun anak sipil. Selain itu hakim dapat memutuskan mengembalikan kepada keluarga atau walinya, dengan dijatuhi pidana bersyarat ataupun mengembalikan kepada orang tua atau wali tanpa pidana.

Oleh karena itu setelah klien dijatuhi putusan oleh hakim, maka Bapas mulai melaksanakan tugasnya yaitu :

- a. Melakukan registrasi klien masyarakat;
- b. Melakukan penelitian masyarakat untuk pembinaan anak didik;
- c. Melakukan bimbingan masyarakat dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang di Lembaga Masyarakat dalam rangka menentukan program kepada narapidana dan anak didik;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana dan anak didik dan klien masyarakat yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Bapas;
- g. Melakukan pengawasan terhadap orang tua asuh dan badan sosial, orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dipenuhi;
- h. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh;
- i. Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan dalam melaksanakan sistem masyarakat;
- j. Menerima keluhan dan pengaduan dari narapidana, anak didik masyarakat dan klien masyarakat.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 juga mengatur tentang petugas masyarakat yaitu terdiri dari : Pembimbing Masyarakat dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Masyarakat (Pasal 33). Adapun tugas dari Pembimbing Masyarakat ini adalah

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Konsepsi pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "treatment of offenders",<sup>99</sup> jadi penekanannya lebih bersifat pembinaan daripada pembalasan.

---

<sup>99</sup> Romli Atmasasmita dan Achmad Soema Dipraja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 19.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugas pokoknya diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai fungsi antara lain :

1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian untuk narapidana/anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>100</sup> Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1974 disebutkan bahwa, Pemasyarakatan adalah suatu proses therapoutic, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan (beberapa unsur dari) masyarakat, sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut. Sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian

<sup>100</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk didik. Untuk itu anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang tidak mampu lagi didik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk didik dan dibina sebagaimana mestinya.

Anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus terpisah dari orang dewasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari penempatan bersama yang akan berakibat buruk terhadap anak. Sedangkan bagi anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai usia 18 tahun, maka akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

*Children are not miniatures; they are a  
totally different kind of being from adult  
(Psychologist : Jean Piaget)*

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan Dilihat dari Standar Internasional**

Pentingnya keberadaan anak dalam melanjutkan kepentingan hidup, tidak hanya bagi sebuah keluarga atau suatu negara tertentu, tetapi juga bagi kelangsungan masyarakat dunia. Oleh karena itu persoalan perlindungan terhadap anak tidak hanya merupakan dan tanggung jawab internasional. Kondisi demikian ini selanjutnya menunjukkan arti pentingnya kerjasama antar negara (kerjasama internasional) di dalam memberikan perlindungan terhadap anak (child defense) demi terwujudnya kesejahteraan anak (child Welfare), sebagaimana telah dirumuskan didalam pembukaan (preamble) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yaitu Recognizing the importance cooperation of international cooperation for improving the living conditions of children in every country, in particular in the developing countries. (Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang).<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF), *Convention on The Rights of The Child*, hal 6.

Perhatian dan tanggung jawab dunia internasional terhadap upaya perlindungan dan perwujudan kesejahteraan anak antara lain ditunjukkan oleh :

1. diadakan atau dibentuknya badan-badan (lembaga-lembaga) internasional, baik yang secara struktural merupakan bagian atau organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti United Nations Children's Fund (UNICEF) dan The Committee on Crime Prevention and Control yang merupakan organ ECOSOC, maupun lembaga-lembaga yang berada di luar struktur PBB, seperti International Forum for Child Welfare (IFCW); dan
2. Dirumuskan atau ditetapkannya Deklarasi dan Konvensi-Konvensi Internasional yang berhubungan dengan upaya-upaya perlindungan dan perwujudan kesejahteraan anak, seperti : Universal Declaration of Human Right, Geneva Declaration of Right of the Child yang disetujui dan disahkan Majelis Umum PBB (General Assembly) sebagai Declaration of the Right of The Child (1959), dan Convention on the Right of the Child, yang disetujui dan disahkan oleh General Assembly, tanggal 20 Nopember 1989.

Pentingnya posisi anak tersebut, merupakan salah satu latar belakang bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak, tidak hanya ditujukan terhadap anak-anak yang bermasalah, tetapi juga ditujukan terhadap anak-anak yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan (berkonflik dengan hukum). Hal ini tergambar dari :

1. Materi Deklarasi sedunia tentang Hak-Hak Anak (1959), yang memuat 10 (sepuluh) prinsip pokok perlindungan, yaitu :



- a. Hak menikmati hak-hak yang tercantum dalam deklarasi ini;
- b. Hak mendapat perlindungan khusus, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dalam keadaan sehat, bebas, dan bermanfaat secara jasmani, mental, ahlak, dan rohani;
- c. Hak memiliki nama kebangsaan;
- d. Hak memperoleh perawatan dan perlindungan sebelum maupun sesudah dilahirkan;
- e. Hak memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus bagi anak-anak yang cacat tubuh dan mental;
- f. Hak mendapatkan kasih sayang dan pengertian terutama dari orang tua mereka sendiri (anak-anak di bawah umur lima tahun tidak dibenarkan berpisah dari ibunya);
- g. Hak untuk mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya di sekolah Dasar, dengan secara cuma-cuma;
- h. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kejahatan, penindasan dan perdagangan;
- i. Hak untuk didahulukan mendapatkan perlindungan dan pertolongan, serta;
- j. Hak untuk memperoleh perlindungan dari perbuatan atau tindakan yang berorientasi pada diskriminasi rasial, agama, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Lihat Nursyahbani Katjasungkana, **Lembaga Perlindungan Anak : Prospek dan Permasalahannya**, Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Terpidana III, UI – Masumoto Foundation Jepang, Jakarta, 1995, hal. 5.

2. Perumusan dari pasal-pasal (article) Convention on the Right of the Child (1989), terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu :

a. Article 37

Shall parties ensure that (Negara-negara peserta harus menjamin bahwa) :

(a) *No child shall be subjected to torture or other cruel in human degrading treatment or punishment, neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age.* (Tak seorang anakpun dapat disiksa atau diperlakukan dengan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak).

(b) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrary. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in the conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.* (Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek).

(c) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect of the inherent dignity of the human person and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every*

*child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances.* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusiaanya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus).

(d) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang dan independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut).

b. Article 39

*State parties shall take all appropriate measures to promote physical recovery and social reintegration of a child victim of any form of neglect, exploitation or abuse, torture or any other form of cruel inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflict. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.* (Negara-negara peserta harus mengambil semua tindakan yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari : setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau dari konflik bersenjata. Pemulihan atau penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak).

c. Article 40

*(1) States parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in the society.* (Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah

melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak-anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali / reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat).

(2) *To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, states parties shall in particular ensure that :* (Untuk tujuan ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari perangkat-perangkat internasional yang relevan, negara-negara peserta khususnya, menjamin bahwa) :

(a) *No child shall be alleged as be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of act or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed.* (Tak seorang anakpun harus disangka sebagai atau dituduh atau dinyatakan sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena perbuatan atau perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan).

(b) *Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees:* (Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana sekurang-kurangnya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut) :

- (i) *To be presumption innocent until proven guilty according to law.* (Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum);
- (ii) *To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and if appropriate through his or her parent or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence.* (Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak, melalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya);
- (iii) *To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority of judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians.* (Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan

untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan walinya yang sah);

- (iv) *Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality.* (Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak);
- (v) *If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law.* (Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang);
- (vi) *To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used.* (Memperoleh bantuan

cuma-cuma dari juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan);

- (vii) *To have his or her privacy fully respected at all states of the proceedings.* (Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam setiap tingkat proses peradilan).

(3) *States parties shall seek to promote establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically, applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and in particular.* (Negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya) :

- (a) *The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law.*

(Penetapan usia minimum dimana usia dibawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana);

- (b) *Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providings that human right and legal safeguards are fully respected.* (Bilamana layak dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti



itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.

(4) *A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care, education; and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well being and proportionate both to their circumstances and the offence.*

(Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan dan peraturan pengawasan; pemberian nasihat; masa percobaan; pemeliharaan anak angkat; program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan).

Dari rumusan pasal-pasal dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam :

- a) Hak untuk dilindungi dari tindakan penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi (Article 37 (a) (b) );
- b) Hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum (Article 37 (b) );
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum dengan segera (Article 37 (d) );
- d) Hak untuk dianggap tidak bersalah (Article 40 (2 a), 40 (2 a 1) );
- e) Hak untuk diberitahu akan tuduhan yang dituduhkan terhadapnya (Article 40 (2.b.2) );

- f) Hak untuk diproses secara cepat (Article 40 (2.b.3) );
- g) Hak untuk menyampaikan kesaksian dengan bebas (Article 40 (2.b.4) );
- h) Hak untuk memperoleh bantuan cuma-cuma (Article 40 (2.b.4) ).

Dengan dirumuskannya hak-hak anak dan kewajiban negara, orang tua dan masyarakat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (1989) tersebut, maka bagi negara peserta yang telah meratifikasi materi dari konvensi di atas, tidak hanya mempunyai tanggung jawab moral tetapi juga tanggung jawab yuridis (hukum). Dalam arti bila negara tersebut lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka lembaga internasional dapat menggugat ataupun menuntut negara tersebut, atas dasar konvensi hak-hak anak ini.<sup>104</sup>

Dilatarbelakangi oleh adanya kemungkinan-kemungkinan anak dalam pergaulan hidupnya melakukan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian menempatkan anak pada posisi “anak yang memiliki masalah kelakuan” atau “anak delikuen”, dan terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum, terdapat dua bentuk pengklasifikasian anak yang secara yuridis diatur / dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengklasifikasikan anak ke dalam :
  - 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak untuk paling tidak sampai berumur 18 tahun (delapan belas tahun);

---

<sup>104</sup> Lihat Carol Bellamy, *Laporan Situasi Anak-Anak Dunia*, United Nations Children's Funds, 1997, hal.9.

- 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas tahun );
  - 3) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas tahun).
- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Beda halnya dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mengklasifikasikan anak yang mengalami masalah kelakuan ke dalam kelompok : Anak nakal saja yang meliputi :
- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- Dimasukkannya anak sipil sebagai salah satu kelompok anak delikuen pada Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tetapi tidak dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997, berkaitan dengan eksistensi Lapas Anak sebagai lembaga pembinaan bagi anak yang mengalami masalah kelakuan, sehingga dimungkinkan anak yang tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi orang tua atau wali si anak “tidak sanggup mendidik dan membina kelakuan anaknya” kemudian akan menempatkan anak tersebut ke dalam Lapas Anak.

Dengan demikian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 hanya ada satu penyebutan saja yaitu “anak nakal”<sup>105</sup>, jadi tidak ada pembagian anak pidana, anak negara dan anak sipil seperti pada Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan orientasi dari undang-undang ini, adalah proses penyelesaian secara hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga yang diatur hanya mengenai hukum pidana formal dan materiil bagi anak nakal saja.

Prosedur hukum pidana yang diterapkan kepada tiap-tiap anak yang terlanjur melakukan perbuatan pidana atau terhadap anak delikuen, memberikan dua kemungkinan, yaitu :

Pertama, bahwa dengan “kepolosan” anak, dimungkinkan timbul atau terbit “rasa bangga” dalam diri si anak, yang kemudian membawa si anak untuk lebih jauh terlibat dalam lingkungan pergaulan yang potensial melakukan tindak pidana.

Kedua, bahwa dimungkinkan si anak akan mengalami “trauma” yang kemudian menempatkan anak pada suasana kehidupan yang “tidak normal”. Perasaan malu dan takut, yang selanjutnya menimbulkan pemikiran untuk “mengisolasi” diri dari lingkungan pergaulannya.

<sup>105</sup> Tidak dimasukkannya “anak sipil” dalam Undang-Undang ini dikarenakan kekhawatiran akan pengaturan yang ganda, sehingga akan menimbulkan kerancuan baik dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, psikologis maupun politis, yang nantinya akan memancing polemik yang berkepanjangan. Berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak maupun instansi pemerintah, hasil-hasil seminar dan Pusat Pengkajian Hukum Islam yang menyatakan mengenai anak sipil ini termasuk dalam sebagian dari Kompetensi Peradilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam ke-4 hal tersebut termasuk dalam pengertian hadhonah/pemeliharaan anak. Oleh karena itu masalah tersebut tidak perlu diatur lagi dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak. Sama halnya dengan materi Hukum Perdata lainnya yang mengatur tentang Perwalian, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar juga tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut dengan pertimbangan yang sama. Lihat Risalah Rancangan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak Buku II, Pendapat Akhir dari Fraksi-Fraksi, Op.Cit., hal. 976-978.

Dua kemungkinan di atas merupakan dasar untuk dilakukannya upaya-upaya perlindungan terhadap anak,<sup>106</sup> agar tindakan-tindakan yang dijatuhkan terhadap anak pada masa proses hukum pidana yang dijalannya, tidak menempatkan anak tersebut pada salah satu dari dua kemungkinan yang sama buruknya tersebut.

Terdapat dua standar internasional yang mengatur tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan atau diterapkan dalam proses peradilan pidana (criminal justice processes) terhadap anak, dengan tidak mengurangi konsep perlindungan anak dan hak anak. Untuk itu pembahasan terhadap tindakan-tindakan yang patut diterapkan dalam proses peradilan pidana, dengan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak anak, dilihat dari dua standar internasional tersebut untuk diperhatikan sehubungan dengan tindakan tersebut.

Urgensi perhatian terhadap kedua standar internasional tersebut dikarenakan secara substansial hanya mengatur dan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan sehubungan dengan bekerjanya peradilan pidana terhadap anak delikuen. Kedua standar internasional yang dimaksudkan tersebut adalah :

1. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rule*), disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33, tanggal 29 Nopember 1985;
2. Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules for The Protection of*

---

<sup>106</sup> Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.

*Juveniles Deprived of Their Liberty*), disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.45/133, tanggal 14 Nopember 1990.

Bagaimana kedua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut mengatur dan merumuskan konsep perlindungan anak dalam proses peradilan, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut ini :

**1. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Beijing Rules*)<sup>107</sup>**

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* merumuskan dasar bagi prinsip sistem peradilan pada rule 5.1, yang mengatur tentang *Aims of Juvenile Justice*, yang berbunyi :<sup>108</sup>

*The Juvenile Justice System emphaze the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumtance of both the offender and the offence.* (Sistem Peradilan pidana bagi remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Selanjutnya penjelasan dari Rule 5.1 tersebut merumuskan, bahwa tujuan atau sasaran penting yang harus dicapai melalui sistem peradilan pidana adalah:<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Beijing Rules merupakan keputusan yang telah diambil dalam pertemuan regional antar pakar di Beijing, pada tahun 1984, guna merumuskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dan pelaksanaan administrasi peradilan yang lebih maju. Adi Andoyo Soetjipto, *Laporan Internasional Seminar on Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency Through Community Partisipation*, Beijing, 19-24 Oktober 1988, hal 3.

<sup>108</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, I, *Op.Cit.*, hal. 112.

<sup>109</sup> *Ibid.*

a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum di mana pelanggar-pelanggar hukum berusia anak-anak ditangani oleh pengadilan-pengadilan keluarga atau oleh pihak-pihak administratif yang berwenang, namun kesejahteraan anak juga harus diutamakan pada sistem-sistem hukum yang mengikuti bentuk peradilan kriminil, dengan demikian menyumbang bagi penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum.

b. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

Prinsip ini sebagai suatu instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi yang menghukum. Jadi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran saja, tetapi juga pada pertimbangan keadaan individu si pelanggar hukum yang nantinya akan mempengaruhi proporsionalitas reaksi-reaksi yang timbul.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut, kemudian dirumuskan ketentuan-ketentuan ataupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam sistem peradilan, agar prosedur yang berlaku di dalamnya tidak mengeksploitasi hak-hak anak yang menjadi "obyeknya".

Adapun persoalan-persoalan pengaturan yang penting dan patut diperhatikan dari Beijing Rules tersebut adalah :

#### a. Batas Usia Anak

Dengan menghormati keberadaan sistem hukum, ekonomi, sosial, dan politik serta budaya yang ada dan dianut oleh masing-masing negara, Beijing Rules mengakui konsep pertanggungjawaban kriminal bagi anak, awal usia yang tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang terlalu

rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Penetapan usia untuk dapatnya seorang anak dituntut pertanggungjawaban kriminal, dilakukan dengan dasar-dasar :

(1) pendekatan budaya

(2) pendekatan modern, yaitu dengan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban kriminal, artinya apakah seorang anak, berdasarkan asas kejernihan pikir dan pemahaman individualnya dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial.

Batas usia ini menurut Undang-Undang No. 3/1997 adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun terhadap anak yang berusia 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan yang berusia 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Untuk masalah usia tersangka ini, tidak jarang adanya pencatatan usia tersangka tidak tepat, hal ini dikarenakan perubahan jaman dan anak lebih cepat dewasa. Namun demikian sering pula terjadi anak sebagai tersangka mengaku berusia "anak" dengan sengaja, karena menurut mereka



perlakuan aparat sistem peradilan pidana akan lebih lunak kepada tersangka anak dibandingkan dengan tersangka dewasa.<sup>110</sup>

#### **b. Perlindungan Pra-Adjudikasi**

Perlindungan pra-ajudikasi, dimaksudkan kepada perlindungan terhadap anak-anak delikuen sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan, dalam SMR-JJ hal ini dirumuskan dalam bentuk pengaturan sebagai berikut :

##### **(1) Perlindungan pada masa pemeriksaan**

Pada saat anak delikuen diperiksa oleh pihak penyidik, SMR-JJ memberikan rambu-rambu yang secara umum harus diperhatikan oleh pihak pemeriksa, yaitu :

- (a) Menempatkan anak pada posisi yang tidak bersalah (Rule 7.1);
- (b) Hak untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum (Rule 7.1);
- (c) didampingi oleh orang tua atau wali anak (Rule 7.1);
- (d) mengetahui tuduhan yang dituduhkan pada anak (Rule 7.1).

Institusi peradilan pidana yang pertama ditemui anak-anak yang berkonflik dengan hukum (delikuen) adalah institusi kepolisian. Dalam aktifitas penangkapan tersangka pelaku anak, seperti juga terjadi pada sebagian kasus pelaku dewasa, terkadang polisi tidak membawa surat penangkapan atau bahkan dengan tindakan pemaksaan. Proses pemeriksaan selalu diikuti dengan penahanan terhadap tersangka, dan jarang sekali polisi memberitahukan hak-hak dari anak tersebut, serta pemberian informasi tentang proses hukum yang lebih lanjut yang akan dihadapi anak.<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Wawancara dengan Polisi, Poltabes Semarang, 12 Oktober 2000.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Polisi, Poltabes Semarang, 12 Oktober 2000.

## (2) Perlindungan pada masa penahanan sebelum putusan (Rule 13)

Persoalan mendasar yang harus diperhatikan, adalah bahwa penempatan anak dalam tahanan didasarkan kepada kepentingan si anak, bukan semata-mata didasarkan kepada kualitas tindakan pidana yang dilakukan si anak. Kondisi ini digambarkan oleh rumusan Rule 13.1 yang menyebutkan : “penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin”. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3/1997 tentang Pengadilan anak, bahwa tenggang waktu penahanan untuk masing-masing tingkatan ditentukan secara berlainan<sup>112</sup>, dan penahanan ini bukan merupakan langkah terakhir. Pada prinsipnya penahanan ini dilakukan demi kepentingan pemeriksaan, selain untuk kepentingan masyarakat dan anak itu sendiri.

Bila penahanan memang merupakan langkah yang terakhir dan pilihan yang efektif yang terpaksa harus diberikan kepada si anak, maka sebagai pedoman yang harus diperhatikan dalam melakukan penahanan adalah :

- (a) Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. (Rule 13.1)
- (b) Dimana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat,

<sup>112</sup> Lihat Tabel I lamanya penahanan dalam Undang-Undang 3/1997 dan bandingkan dengan penahanan yang terdapat dalam KUHP.

perawatan intensif atau pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan. (Rule 13.2)

- (c) Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan Terhadap Narapidana yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Rule 13.3)
- (d) Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah atau pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa. (Rule 13.4)
- (e) Sementara dalam penahanan, anak-anak akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan, sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian. (Rule 13.5)

Sedangkan hak-hak anak yang ditahan sebelum persidangan berhak atas semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana dari Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik,<sup>113</sup> yaitu :

Article 9 :

- (1) Setiap orang mempunyai hak kebebasan dan keamanan. Tidak seorangpun dapat dijadikan pelaku oleh kesewang-wenangan hukum atau ditahan. Tidak seorangpun dapat dirampas

<sup>113</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, United Nation Resolution 2200 A (XXI), tanggal 16 Desember 1966.

kemerdekaannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

- (2) Seseorang yang ditahan harus diberitahu, saat ditahan, alasan penahanan, dan harus cepat diberitahu mengenai kejahatan yang dituduhkan.
- (3) Seseorang yang ditangkap atau ditahan dalam perkara pidana harus diproses dengan cepat.
- (4) Seseorang yang dirampas kemerdekaannya karena ditahan berhak atas peradilan yang pasti.
- (5) Seseorang yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan hukum atau penahanan harus mendapatkan hak untuk kompensasinya.

Article 10.2 (b) :

Seorang anak yang dituduh harus dipisah dari tahanan dewasa dan dimungkinkan memperoleh peradilan secepatnya.

Article 10.3 :

Sistem pemenjaraan harus meliputi pembinaan narapidana sebagai tujuan utamanya selain dari keharusan untuk mengadakan perubahan dan rehabilitasi sosial, anak pelaku tindak pidana harus dipisah dari tahanan dewasa dan diberikan pembinaan yang sesuai dengan umur dan status hukumnya.

Pedoman penahanan dan hak-hak anak yang ditahan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang No. 3/1997, hanya penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Mengenai masa penahanan di Kepolisian, seperti layaknya perkara yang tersangkanya orang dewasa,

masih banyak dijumpai argumentasi dari kepolisian yang tidak kuat sebagai alasan penahanan tersangka. Oleh karenanya sedikit sekali ditemui adanya tersangka anak yang diberikan penahanan rumah atau dalam kota. Sementara itu ruang tahanan khusus anak di kantor polisi tidak ada, sehingga sampai saat ini tahanan anak disatukan dengan tahanan dewasa.<sup>114</sup> Mengenai tempat penahanan ini dalam Undang-Undang No. 3/1997 disebutkan bahwa tahanan anak harus terpisah dengan tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat 3), namun kenyataan di lapangan belum bisa terpenuhi sehingga masih disatukan dengan tahanan dewasa.

Untuk lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia, metode pemberian pelayanan yang didasarkan kepada karakteristik tiap-tiap anak secara individual belum dapat dikatakan memadai, karena metode pembinaan yang diberikan bersifat universal dalam arti memandang setiap atau semua anak itu sama (hasil penelitian tetapi bukan untuk poin ini).

### c. Perlindungan Pada Saat Adjudikasi

Tidak jauh berbeda dengan perlindungan pada masa pra-adjudikasi, pada saat adjudikasi dilaksanakan terhadap si anak, maka perlindungan-perlindungan yang diberikan pada saat pra-adjudikasi juga wajib diberikan pada saat adjudikasi dilaksanakan, namun terdapat tambahan pada tahap ini yaitu :

- (1) Si anak harus ditempatkan pada proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak diskriminatif (Rule 14.1);
- (2) Proses peradilan yang diterapkan kepada si anak diupayakan tidak menimbulkan suasana yang menempatkan si anak identik dengan

<sup>114</sup> Pengakuan AS, 13 tahun, tersangka pelaku perbuatan cabul yang sedang dalam proses, selama ditahan di Poltabes Semarang disatukan dengan tahanan dewasa, Semarang, 31 Agustus 2000.

orang dewasa yang diadili, melainkan proses peradilan yang berjalan diupayakan menimbulkan suasana kekeluargaan, yang memahami si anak (Rule 14.2);

- (3) Peradilan yang diselenggarakan kepada anak-anak delikuen, adalah merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional tiap-tiap negara. Dalam arti bahwa peradilan yang diselenggarakan bukan mengejar pembuktian bersalah atau tidaknya si anak, melainkan dalam rangka membangun manusia yang utuh (Penjelasan Rule 14.2 poin 1.4);

Sehubungan dengan keleluasaan hakim dalam memilih jenis sanksi pidana yang sesuai bagi anak, harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Rule 17.1) :

- (1) Reaksi yang diambil senantiasa sebanding tidak hanya pada keadaan-keadaan dan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada keadaan-keadaan dan keperluan-keperluan anak itu maupun pada keperluan-keperluan masyarakat;
- (2) Pembatasan-pembatasan atas kebebasan pribadi anak itu hanya dapat dikenakan setelah pertimbangan yang seksama dan akan dibatasi pada kemungkinan terkecil;
- (3) Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali anak itu diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak terdapat jawaban lain yang memadai;

(4) Kesejahteraan anak itu akan menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.

Sama halnya dengan pedoman penahanan, maka dalam Undang-Undang No. 3/1997 pun tidak tercantum ketentuan “pedoman” tentang prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana /tindakan) kepada anak. Padahal pedoman penjatuhan pidana ini sangat penting sebagai titik awal terutama untuk penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, sehingga dapat menyumbang secara berarti untuk memastikan hak-hak dasar pelanggar-pelanggar hukum berusia anak-anak dilindungi, terutama hak-hak dasar pengembangan dan pendidikan pribadi.

Sebelum memutus perkara anak, sebagai bahan pertimbangan hakim adalah penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas yang dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga dapat diketahui motif-motif apa saja yang menjadikan anak tersebut berkonflik dengan hukum. Namun pedoman khusus untuk hakim dalam memutus perkara tidak ada, hanya berdasarkan pada keyakinan hakim<sup>115</sup>

Mengenai Penelitian Kemasyarakatan ini dalam SMR-JJ juga mengaturnya yaitu (Rule 16.1) :

“Pada semua perkara kecuali yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kecil, sebelum pihak berwenang secara hukum memberikan pengambilan keputusan akhir sebelum vonis dijatuhkan, latar belakang

<sup>115</sup> Wawancara Hakim, PN Semarang, 11 Agustus 2000.

dan keadaan di mana anak tersebut hidup atau keadaan-keadaan di bawah di mana pelanggaran hukum telah dilakukan atau diselidiki secara benar sehingga mempermudah pengambilan keputusan hukum dari perkara itu oleh pejabat yang berwenang.” Sehubungan dengan hal ini maka tugas dari BAPAS selain membuat penelitian kemasyarakatan, juga mendampingi tersangka dan menghadiri jalannya persidangan anak. Namun kadang-kadang kehadiran BAPAS ini ditolak oleh hakim, karena saran dari Bapas ini oleh hakim dianggap menggurui.<sup>116</sup>

#### d. Perlindungan Purna Adjudikasi

Terhadap pelaksanaan putusan hakim ini dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu lembaga pemasyarakatan. Namun disarankan penempatan seorang anak pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan penempatan dari pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. (Rule 19.1) Hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh-pengaruh merugikan terhadap seorang individu yang muncul di dalam wadah kelembagaan yang tidak dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya perawatan. Terutama pada anak-anak yang rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Lebih jauh lagi pengaruh-pengaruh negatif, tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga pemisahan dari lingkungan sosial biasanya, pasti akan lebih parah bagi anak-anak dibandingkan bagi orang dewasa karena tahap pertumbuhannya yang masih awal.

---

<sup>116</sup> Wawancara Petugas, BAPAS Semarang, 8 Agustus 2000.



Sebagai pelaksanaan yang efektif dari pengambilan keputusan hakim ini dalam SMR-JJ dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlakuan Non-Institusional (Rule 23)

Adanya peran serta dari suatu badan yang independen (dewan pembebasan bersyarat, kantor masa percobaan hukuman, lembaga-lembaga kesejahteraan pemuda dan lainnya) dengan kualifikasi sama dengan yang dimiliki pihak berwenang yang pertama memberi pengambilan keputusan itu.<sup>117</sup>

2. Perlakuan Institusional (Rule 26)

Perlakuan institusional ini merupakan treatment khusus bagi anak di lembaga yaitu :

(1) Tujuan pelatihan dan perlakuan terhadap anak-anak yang ditempatkan di lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan ketrampilan khusus dengan maksud agar mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat nantinya.

(2) Anak-Anak yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan yang diperlukan, sosial, pendidikan, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka perlukan karena usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka dan demi kepentingan keseluruhan pertumbuhan mereka.

---

<sup>117</sup> Lihat penjelasan SMR-JJ, Rule 23.

- (3) Anak-anak yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah atau pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa.
- (4) Pelanggar-pelanggar wanita berusia muda yang ditempatkan pada suatu lembaga pemasyarakatan patut mendapatkan perhatian khusus terhadap keperluan-keperluan dan masalah-masalah pribadi mereka. Mereka sama sekali tidak boleh menerima perawatan, perlindungan, bantuan, perlakuan dan latihan yang lebih sedikit dari pelanggar-pelanggar hukum pria berusia muda. Perlakuan yang adil terhadap mereka akan dipastikan.
- (5) Demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali akan memiliki hak akses.
- (6) Kerjasama antar menteri dan antar departemen akan dibina untuk tujuan memberikan pelatihan akademis atau, dimana layak, ketrampilan bagi remaja-remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam keadaan pendidikan yang tertinggal.

Treatment khusus seperti dalam Beijing Rule di Undang-Undang No. 3/1997 tidak ada, hanya disebutkan bahwa terhadap anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang

harus terpisah dari orang dewasa, dan berhak memperoleh pendidikan serta latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta hal lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 60). Adanya hal ini paling tidak sudah merupakan terobosan untuk mengadakan treatment khusus yang sesuai dengan Beijing Rule.

Satu hal yang menarik dari Beijing Rule ini adalah adanya diversi (pembiasan) yang merupakan salah satu kelebihan dari peraturan ini, yaitu :

1. Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak untuk menangani pelanggaran-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1 di bawah ini.<sup>118</sup> (Rule 11.1)
2. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara remaja akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. (Rule 11.2)
3. Pengalihan apapun melibatkan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak-anak itu, atau orang tua atau walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara itu tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan. (Rule 11.3)

<sup>118</sup> Rule 14.1 Dimana perkara seorang pelanggaran hukum berusia anak-anak belum dialihkan (di bawah peraturan 11), ia akan ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum (pengadilan, tribunal, dewan majelis dll), sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.

4. Agar mempermudah penempatan kebebasan membuat keputusan pada perkara-perkara anak, upaya-upaya akan diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban-korban. (Rule 11.4).
5. Pihak berwenang (hakim) secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. (Rule 17.4)

Bertolak dari Rule di atas, maka bisa saja hakim menghentikan proses peradilan. Dengan kata lain bisa saja hakim tidak menjatuhkan sanksi apapun (pidana/tindakan)<sup>119</sup>

Diversi ini merupakan *"a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders"* dan dalam Undang-Undang No. 3/1997 ini tidak dijumpai adanya diversi.

Selain prinsip-prinsip di atas, terdapat prinsip-prinsip lain yang diatur dalam SMR-JJ, sehubungan dengan perlindungan hak-hak anak delikuen, diantaranya adalah :<sup>120</sup>

- a. Kebijakan sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anak, perlu dilakukan dengan tersusunnya kebijakan sosial yang demikian, pada gilirannya akan mengurangi keterlibatan dan campur tangan sistem peradilan anak.

Pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum terlibat perilaku penyimpangan dan kejahatan perlu dilakukan.

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief I, *Op.Cit.* hal. 165.

<sup>120</sup> Lihat Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Badung, 1997, hal. 113.

Kebijakan dasar yang terkandung dalam resolusi ini adalah anak terselamatkan dari penerapan resolusi ini;

(1) Pengkategorisasian jenis penyimpangan dan kejahatan hendaknya dirumuskan secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa;

(2) Pembinaan anak dapat dilakukan di luar lembaga atau di dalam lembaga.

Pembinaan anak di luar lembaga hendaknya melibatkan lembaga-lembaga, seperti : parole, probation, dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak baik pemerintah maupun non pemerintah, yang kesemuanya diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi anak, sementara pembinaan anak di dalam lembaga hendaknya dipedomani prinsip individualisasi perlakuan, artinya dalam pembinaannya hendaknya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak yang bersangkutan. Disamping itu perlu juga adanya dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak di dalam lembaga. Satu hal yang penting diperhatikan bagi orang tua dan penasihat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak;

- b. Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan, di samping perlu dipikirkan dibentuknya tempat pembinaan yang bersifat semi lembaga.

**2. Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*)**

Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam peraturan ini adalah :

- a. Sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Hukuman penjara harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir.(Rule1). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3/1997, maka pidana perampasan kemerdekaan disini bukan sebagai upaya yang terakhir bahkan lamanya pidana bervariasi.<sup>121</sup>
- b. Menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh pihak kehakiman yang berwenang, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasannya yang lebih awal. (Rule 2).
- c. Perlindungan bagi anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan dengan maksud meniadakan pengaruh-pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan dan untuk membina pengintegrasian dalam masyarakat.(Rule 3)

---

<sup>121</sup> Lihat Tabel 1.

Sama halnya dengan Beijing Rule, dalam peraturan ini juga disinggung masalah usia anak yang diperbolehkan dirampas kemerdekaannya, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, batas usia di bawah mana tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh undang-undang. (Rule 11.a) Sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan kebebasan menurut peraturan ini adalah bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sesuatu pihak kehakiman, administratif atau pihak umum lainnya. Dengan demikian jelas bahwa yang termasuk dalam kategori ini adalah anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

Menghilangkan kebebasan harus dikenakan pada kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang menjamin penghormatan hak-hak asasi manusia anak. Anak yang ditahan pada fasilitas-fasilitas pemasyarakatan harus dijamin mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang berarti, yang akan berfungsi untuk memajukan dan mempertahankan kesehatan dan harga diri mereka, untuk membina rasa tanggung jawab mereka, mendorong sikap-sikap dan ketrampilan-ketrampilan yang akan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka sebagai anggota masyarakat. (Rule 12). Kenyataan yang ada bahwa hampir semua kasus anak yang terjadi sudah pasti tersangkanya ditahan, tanpa melihat kondisi atau keadaan hak asasi dari anak tersebut serta tindak pidana yang dilakukan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara Polisi, Poltabes Semarang 12 Oktober 2000.

Seseorang yang kehilangan kebebasannya tidak begitu saja, melainkan melalui proses, yaitu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (delikuen) dihadapkan pada proses peradilan pidana. Pada proses awal seorang anak yang ditahan dibawah penangkapan atau sedang menunggu peradilan ("belum diadili") harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Penahanan sebelum peradilan sedapat mungkin dihindarkan dan dibatasi pada keadaan-keadaan yang luar biasa. Dengan demikian, segala upaya harus dilakukan untuk menerapkan tindakan-tindakan alternatif lain. Namun demikian, jika penahanan preventif digunakan, pengadilan bagi anak dan badan-badan pengusut harus memberi prioritas tertinggi pada penanganan yang tercepat terhadap kasus-kasus demikian untuk menjamin agar masa penahanan sesingkat mungkin. Para anak yang ditahan dan belum diadili harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman. (Rule 17).

Pada masa penahanannya tersebut seorang anak berhak untuk : (Rule 18.a.b)

- a. Diperbolehkan diberi nasehat oleh pengacara hukum dan meminta bantuan hukum tanpa biaya;
- b. Diberi kesempatan untuk bekerja dengan upah, dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, namun semuanya itu tidak boleh menyebabkan perpanjangan penahanan.

Satu hal yang menarik pada peraturan ini adalah adanya pemisahan yang dilakukan terhadap anak yang ditahan atau dirampas kemerdekaannya satu sama lain dengan maksud untuk menentukan jenis asuhan yang paling sesuai dengan

UPT-PUSTAK-UNDIP



kebutuhan-kebutuhan khusus individu-individu yang bersangkutan dan perlindungan integritas dan kesejahteraan fisik, mental dan moral. (Rule 28) Jika dibandingkan dengan keadaan di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam memberikan bimbingan dan asuhannya dilakukan dengan sistem paket, dalam arti terhadap anak binaan tersebut bimbingan dan asuhannya disamakan semua tanpa melihat kebutuhan dan sifat khusus dari anak. Padahal bimbingan sistem paket ini belum tentu cocok untuk diterapkan pada anak dengan pelanggaran yang sama.<sup>123</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Anak disini dibedakan menjadi 2 (Rule 30) yaitu

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Lembaga pemasyarakatan ini mempunyai ciri-ciri dengan populasi yang sekecil mungkin, karena untuk memudahkan pengawasan dan harus mempunyai fasilitas keamanan yang ekstra.<sup>124</sup>

2. Lembaga Pemasyarakatan Tertutup

Lembaga pemasyarakatan ini mempunyai ciri-ciri dengan populasi anak binaan cukup untuk pengasuhannya dan fasilitas keamanan yang sedang.<sup>125</sup>

<sup>123</sup> Wawancara dengan petugas LAPAS Pemuda Plantungan, Kendal, 19 September 2000, dan wawancara dengan petugas LAPAS Anak Kutoarjo, Purworejo 20 Nopember 2000.

<sup>124</sup> Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan di Kendal bisa dikategorikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang pada mulanya adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak, hal ini dikarenakan bangunan yang dipergunakan pada mulanya adalah Rumah Sakit Kusta. Sehingga bentuk ruangan anak binaan adalah bangsal dan terkesan besar. Sebagai LAPAS yang terbuka, maka jumlah anak binaannyapun sedikit yaitu 6 anak per-September 2000.

<sup>125</sup> Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo di Purworejo bisa dikategorikan sebagai LP Tertutup, dengan melihat keadaan di lapangan bahwa LP Anak tersebut dikelilingi oleh tembok pagar yang tinggi. Sedangkan ruangnya terkotak-kotak seperti sel dewasa dengan penghuni yang bervariasi. Jumlah anak binaan sebanyak 47 anak per-Nopember 2000 dan pengawasannya cukup.

Sebagai anak binaan, hak-hak anakpun diperhatikan dan dilindungi.

Adapun yang menjadi hak-hak dari anak tersebut adalah :

1. Hak atas pelayanan kesehatan (Rule 49-55);
2. Hak atas fasilitas yang memadai (tempat tidur dsb) (Rule 33);
3. Hak atas perlindungan privasi anak (Rule 35);
4. Hak atas pendidikan (Rule 38);
5. Hak mendapatkan latihan ketrampilan (Rule 42);
6. Hak untuk dimungkinkan melakukan pekerjaan dengan menerima upah (Rule 45);
7. Hak untuk rekreasi (Rule 47);
8. Hak untuk menjalankan ibadah (Rule 48)

Hak-hak yang terdapat dalam peraturan ini sedikit banyak telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia.<sup>126</sup> Hal ini dapat dilihat pada jadwal kegiatan dari anak binaan tersebut setiap harinya.

Sebagai bagian yang menentukan berhasil tidaknya terhadap pembinaan anak binaan ini adalah para petugas yang bekerja di Lapas Anak tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam peraturan ini disebutkan bahwa : petugas-petugas harus berkualitas dan mencakup jumlah cukup spesialis-spesialis pendidik, instruktur-instruktur ketrampilan, penasihat-penasihat, pekerja-pekerja sosial, psikiater-psikiater dan psikolog-psikolog. (Rule 81).

Petugas harus mendapatkan latihan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif, khususnya latihan dalam psikologi anak, kesejahteraan anak dan standar-standar serta norma-norma hak asasi manusia dan hak asasi anak.(Rule 85).

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Petugas Lapas Anak Kutoarjo, Purworejo, 20 Nopember 2000.

Terhadap semua ini, dalam pelaksanaan tugasnya petugas harus menghormati dan melindungi harkat diri manusia dan hak-hak asasi manusia yang mendasar bagi semua anak, khususnya dalam hal : (Rule 87)

- a. Tidak satupun lembaga yang menghukum atau petugas kemasyarakatan boleh mengenakan, menghasut, atau membiarkan tindakan penyiksaan apapun atau bentuk perlakuan apapun yang kasar, tidak manusiawi atau merendahkan dengan dalih atau keadaan apapun juga;
- b. Semua petugas harus menentang dan memerangi dengan keras tindakan korupsi apapun, melaporkannya dengan segera pada pejabat-pejabat yang berwenang;
- c. Semua petugas harus menghormati peraturan-peraturan ini. Petugas yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran serius dari peraturan-peraturan ini telah terjadi atau tengah akan terjadi harus melaporkan hal itu pada pejabat-pejabat atau badan-badan atasannya yang diberi kekuasaan untuk mengkaji ulang atau memperbaiki;
- d. Semua petugas harus menjamin perlindungan penuh bagi kesehatan fisik dan mental anak, termasuk perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi fisik, seksual dan emosional, dan harus mengambil tindakan cepat untuka memastikan adanya perhatian kesehatan bilamana perlu.
- e. Semua petugas harus menghormati hak asasi anak untuk privasi dan terutama, harus mengamankan semua hal rahasia yang menyangkut anak-anak atau keluarga mereka yang diketahui sebagai akibat kedudukan profesional mereka;

- f. Semua petugas harus mencoba memperkecil perbedaan-perbedaan apapun antara kehidupan di dalam dan di luar fasilitas pemasyarakatan yang cenderung mengurangi penghormatan pada harga diri anak-anak sebagai manusia.

Dibandingkan dengan standar internasional tersebut, maka dalam undang-undang No. 3 tahun 1997, ada hal-hal yang berbeda yaitu “istilah anak nakal”.. Lain halnya dengan standar internasional yang hanya menyebut “anak” saja dalam peraturannya; sistem hukuman yang tidak membatasi penjatuhan pidana secara terbatas dan sebagai upaya terakhir (last resort); kedudukan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang belum diposisikan sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana; menghindari kekerasan dalam penyidikan (dengan tahanan rumah/kota bukan ditahan di rutan dan wajib didampingi pengacara); serta hak atas bantuan hukum yang masih lemah.

Singkatnya masih banyak persoalan yang perlu dikembangkan menyangkut pengaturan anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada intinya gagasan perlindungan anak sudah terpenuhi secara detil dan tegas yang meliputi tahapan: <sup>127</sup>

1. Pencegahan terjadinya anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan peradilan;
3. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani pidana dan tindakan;

---

<sup>127</sup> Mohammad Joni, *Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak di Lapangan*, Semiloka Draf RUU Perlindungan Anak, kerjasama FK-PPAI-UNICEF, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.

4. Rehabilitasi pasca menjalani pidana, yang paling penting bahwa status yang dimiliki anak yang berkonflik dengan hukum tidak menghilangkan hak-haknya sebagai anak (right of the child), reintegrasi sosial, destigmatisasi dan non diskriminasi.

“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya” (Javier Perez de Cuellar). Kalimat tersebut patut direnungkan, untuk mengetahui sejauh mana kepekaan suatu bangsa dalam menghadapi masalah anak. Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau suatu bangsa (Indonesia) itu paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak.<sup>128</sup> Adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, terutama terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (delikuen).

Untuk melihat secara jelas terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional (Undang-Undang No. 3/1997, Undang-Undang 8/1981, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini apakah sudah sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Beijing Rule dan Deprivation of Liberty, berikut tabel tersebut :

---

<sup>128</sup> Paulus Hadisuprpto, *Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia*, disunting oleh Purnianti, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, Jurusan Kriminologi FISIP-UI, Jakarta, 1999, hal 23.

**TABEL 1 TENTANG PENGATURAN  
PENAHANAN DAN PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

	Tenggang wkt penahanan	Tenggang wkt. Pidana PK	Prinsip Penahanan	Prinsip pidana PK	Pelaksanaan
<b>Beijing Rule</b>	Last resort (Rule 13)	Last resort (Rule 17.1.b)	-last resort (Rule 13) -waktu singkat	-last resort -praduga tak bersalah	-di LP untuk waktu yang sesingkat mungkin
<b>Deprivation of Liberty</b>	Last resort (Rule 2)	Last resort (Rule 1 jo Rule 2)	Dihindarkan dan dibatasi pd keadaan yang luar biasa.	Sebagai last resort	-di LP -terpisah dari orang dewasa
<b>UU No.3/1997</b>	-Polisi 20 hari, -Jaksa 10 hari -Hakim 15 hr -Banding 15 hr -Kasasi 25 hari	-penjara $\frac{1}{2}$ maks.dewasa -kurungan $\frac{1}{2}$ maks dewasa -seumur hidup/mati maks. 10 th.	-untuk kepentingan pemeriksaan	-sebagai proses pembinaan	-Rutan/LP Anak -terpisah dengan orang dewasa
<b>UU No.8/1981</b>	-Polisi 20 hari -Jaksa 20 hari -Hakim 30 hari -Banding 30 hr -Kasasi 50 hari	Tidak ada	Untuk kepentingan proses berdasarkan bukti yg cukup agar tidak melarikan diri	Tidak ada	Hasil putusan Pengadilan dieksekusi oleh Jaksa dan ditempatkan di LP.
<b>KUHP</b>	Tidak ada	-pidana pokok dikurangi 1/3 -pidana mati / seumur hidup maks 15 th.	Tidak ada	Sebagai pengimbalan atas perbuatan yg dilakukan	Tidak ada

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang sudah diatur dalam perundang-undangan nasional sudah sesuai dengan instrumen internasional, namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat juga hal-hal yang belum diatur dalam perundang-undangan nasional. Hal ini dapat dijadikan masukan dan catatan tersendiri untuk pembuatan atau perubahan peraturan lagi nantinya.

## B. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan

Membicarakan perlindungan hukum terhadap tiap-tiap orang yang kemerdekaannya dirampas melalui putusan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, tidaklah terlepas dari hakikat pidana yang pada satu sisi tertentu akan menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang menerima putusan tersebut (tanpa terkecuali yang dikatakan sebagai anak). Apa yang penulis kemukakan ini, merupakan penjabaran dari salah satu poin Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan Ke VII (1985), yang diselenggarakan di Milan-Italia, yang menyebutkan : “...., sedikit banyaknya pidana yang dijatuhkan kepada terpidana akan memberikan dampak negatif”. Bahkan terdapat satu peribahasa yang mengemukakan, “bagaimanapun ringannya pidana badan namun yang pasti keberadaannya lebih berat dari pada pidana denda (*quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria*).<sup>129</sup>

Bertolak dari pandangan di atas, maka mengawali pembicaraan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang ditahan atau dikarenakan dirampas kemerdekaannya, terlebih dahulu penulis menguraikan secara garis besar, hakikat dari “pidana” itu sendiri. Hal ini dirasa perlu dikarenakan pemahaman aparat dalam perlindungan hukum bagi anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan terhadap hakikat pidana tersebut, akan mempengaruhi pihak aparat di dalam memahami,

<sup>129</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet., ke-2, 1993, hal., 3.

menterjemahkan, dan menentukan tindakan-tindakan yang akan diterapkan terhadap anak yang dimasukkan ke dalam tahanan dan dipidana perampasan kemerdekaan.

Istilah pidana (*poena*), sering juga diidentikkan dengan istilah hukuman, yaitu sebagai suatu balasan yang diberikan atas tindak pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh setiap orang. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa "pidana merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik."<sup>130</sup> Rumusan pidana ini menunjukkan, bahwa sebelum sanksinya diterapkan, terdapat suatu proses yang memang terlebih dahulu dilalui. Proses yang dimaksudkan tersebut adalah pembedaan. Hal ini seperti tersirat dalam ungkapan Muladi, yang menyebutkan : "dalam arti umum, proses pembedaan merupakan wewenang pengundang-undangan, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik poena maupun crimen harus terlebih dahulu ditetapkan, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seseorang pelaku tindak pidana"<sup>131</sup>.

Mengartikan pidana dan pembedaan sebagai suatu "proses pembalasan" merupakan satu kendala umum yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana Indonesia dewasa ini, sehingga tidak heran bila mulai dari awal proses peradilan pidana tersebut berjalan, sampai kepada pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan, gambaran tindakan yang diterapkan, adalah tindakan-tindakan yang sifatnya "represif". Seperti : paksaan dan kekerasan untuk

<sup>130</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum (Hukum Pidana Kodifikasi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet., ke-1, 1990, hal., 69.

<sup>131</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief II, *Op.Cit.*, hal., 77.



mendapatkan pengakuan (oleh penyidik), penjatuhan hukuman badan (oleh pengadilan), dan penahanan dan hukuman kerja (oleh lembaga peasyarakatatan). Refleksi dari masih dominannya aparat peradilan pidana menafsirkan dan mewujudkan pengertian pidana dan pemidanaan tersebut sebagai suatu rangkaian tindakan pembalasan, adalah maraknya kasus-kasus narapidana yang melarikan diri atau melakukan tindak pidana di dalam masa tahanan yang dijalannya, akhir-akhir ini. Secara manusiawi, persoalan yang disebutkan terakhir itu muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian (diskrepansi) antara tindakan yang diterapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan (tahanan), sehingga muncul konflik dalam diri yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindak pidana di rumah tahanan.

Sama halnya dengan pidana perampasan kemerdekaan, maka penahananpun merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang sifatnya sementara sambil menunggu berjalannya proses peradilan pidana. Jika ternyata hasil dari proses peradilan pidana tersebut berupa pidana penjara atau kurungan, maka terhadap tersangka yang ditahan akan berlanjut dengan pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat tetap.

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan, bahwa proses peradilan pidana yang diterapkan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum (delikuen) adalah dalam rangka penyembuhan anak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara normal dan wajar. Oleh karenanya peradilan pidana dikatakan sebagai bagian dari pembangunan nasional, yaitu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan di atas, maka dirumuskan hak-hak anak delikuen., yang harus diperhatikan dan dilindungi pada setiap tahapan dalam proses peradilan pidana. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, merupakan persoalan yang kerap kali ada dalam kehidupan. Begitulah gambaran perlindungan hukum terhadap anak-anak delikuen, yang kemerdekaannya dirampas, baik pada proses peradilan yang berjalan maupun sebagai realisasi dari putusan pengadilan. Walaupun hak-hak anak tersebut telah dirumuskan secara yuridis, sehingga ada kekuatan mengikat dan memaksa supaya keberadaannya diperhatikan, akan tetapi dalam kenyataannya, tidak sedikit dari hak-hak tersebut yang tidak dilaksanakan.

Bertolak dari kondisi yang diuraikan tersebut, uraian berikut ini akan mengemukakan beberapa persoalan yang menjadi kendala perlindungan hukum bagi anak-anak yang ditahan atau dirampas kemerdekaannya.

Diantara kendala-kendala yang penulis temui di lapangan adalah :

## **1. Kendala Terhadap Penahanan Anak**

### **a. Bidang perundang-undangan**

Perundang-undangan merupakan muara bagi kebijakan formulasi yang memberikan arah dan landasan bagi bekerjanya proses peradilan pidana. Berdasarkan undang-undang hukum pidana materiil (Law of Criminal Substantive), tidak dipungkiri bahwa hak-hak dasar dari anak-anak delikuen ini telah dirumuskan secara relatif baik, walaupun terhadap instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak delikuen, kita belum mempunyai badan atau lembaga yang secara khusus menganalisa instrumen-instrumen internasional, yang nantinya akan

dirumuskan sebagai materi perundang-undangan. Oleh karenanya tidak mengherankan bila peraturan perundang-undangan kita yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, masih terkesan kurang mengikuti perkembangan kebutuhan hak anak-anak. Disamping law of criminal substantive yang demikian, ketentuan perundang-undangan yang bersifat formal (Law of Criminal Procedural) yang mengatur tentang mekanisme peradilan anak tergambar kaku mengatur mekanisme peradilan yang berjalan. Kondisi ini dikarenakan setelah Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ditetapkan dan diberlakukan, sampai saat ini belum disertai dengan petunjuk pelaksanaannya. Terlebih lagi substansi Undang-Undang No.3 tahun 1997 belum mengatur hubungan kerja antar lembaga.

Sebagai contoh, terhadap hal diatas, adalah proses pemeriksaan perkara anak dan pengajuan Berita Acara Pemeriksaan anak masih cenderung tidak didasarkan kepada hasil penelitian tentang karakteristik anak. Berita Acara Pemeriksaan anak langsung diberikan kepada pengadilan. Bahkan kadang-kadang karena waktu yang sempit, sedangkan bukti-bukti belum cukup, maka dimungkinkan pemberkasannya menjadi terlambat, karena BAP ada yang kurang. Untuk itu perlu koordinasi antar aparat, dengan melihat masa penahanan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 cukup singkat<sup>132</sup>

Juga dikarenakan adanya hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 3/1997, seperti pedoman penahanan dan hak-hak anak yang ditahan,. Padahal semua itu penting sekali dalam pelaksanaan peradilan bagi

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Jaksa, Kejari Semarang, 31 Agustus 2000.

anak yang bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak. Penahanan diusahakan sebagai upaya yang terakhir untuk jangka waktu yang singkat.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

Peraturan perundang-undangan yang ada tidak hanya mengatur perlindungan hak-hak anak yang dirampas kemerdekaannya dalam bentuk yang fisik, tetapi juga yang bersifat psikis. Dua jenis hak ini menuntut pemerintah (negara) untuk mempunyai lembaga yang menjadi penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya dengan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan kedua jenis hak tersebut.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di atas, di dalam prakteknya ditemukan :

Terhadap kondisi fisik ruangan tempat di mana anak yang dirampas kemerdekaannya tersebut ditahan :

- 1) Ruang tahanan yang berada di kepolisian (Poltabes Semarang), anak disatukan dengan orang dewasa yang juga berada dalam proses peradilan;
- 2) Dalam keadaan tertentu, kepolisian memperpanjang penahanan anak sebelum dilimpah ke Kejaksaan;
- 3) Setelah putusan pengadilan ditetapkan, kadang-kadang si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

Ketiga wadah penahanan anak tersebut, baik yang terdapat di Kepolisian, Kejaksaan (dititipkan di Rutan dewasa) maupun Lembaga Pemasyarakatan Anak (khususnya Kutoarjo) kondisinya tidaklah berbeda jauh : ruang sempit dan kurangnya ventilasi udara, sementara kuantitas tahanan yang terdapat dalam satu ruangan cukup banyak, sehingga

menyebabkan suasana ruang tahanan tersebut pengap. Tidak ada ketentuan khusus tentang berapa banyak anak yang seharusnya ada di dalam satu sel, tetapi jumlahnya harus ganjil. Tujuannya untuk mencegah perkelahan, dimana bila terjadi ada pihak yang bisa meleraikan. Kondisi fisik ruang tahanan ini merupakan salah satu gambaran, bahwa perlindungan terhadap kesehatan anak kurang mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana.

Tabel 2 berikut menunjukkan tanggapan 47 anak binaan Lapas Kutoarjo yang kemerdekaannya dirampas, terhadap kondisi fisik ruang tahanan yang pernah ditempati.

**TABEL 2**  
**REKAPITULASI TANGGAPAN ANAK BINAAN TERHADAP**  
**KONDISI FISIK RUANG TAHANAN PER NOPEMBER 2000**

NO	Tanggapan	Ruang Tahanan					
		POLISI		RUTAN		LAPAS	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Baik	17	36.17 %	16	34.04 %	15	31.91 %
2	Sedang	22	46.80 %	26	55.31 %	29	61.70 %
3	Tidak Baik	8	17.03 %	5	10.65 %	3	6.39 %
Jumlah		47	100 %	47	100 %	47	100 %

Sumber : diolah dari Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa keadaan fisik ruang tahanan di Kepolisian termasuk dalam kategori sedang, hal ini ditunjukkan dari prosentase sebesar 46, 80 % (dari 47 napi anak yang menjadi responden). Begitu juga keadaan fisik ruang tahanan yang ada di Rutan dan Lapas juga termasuk dalam kategori sedang dengan prosentase 55,31 % untuk kondisi fisik di Rutan dan 61,70 % untuk kondisi fisik di Lapas.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah sampai saat ini belum dikenal adanya Rumah Tahanan yang khusus untuk anak-anak. Oleh karena itu rumah tahanan yang ada dipergunakan untuk menampung orang-orang dewasa dan anak-anak. Dalam beberapa kondisi pemisahan dimungkinkan berdasarkan jenis kelamin, sedangkan pemisahan berdasarkan usia dewasa dengan anak-anak seringkali tidak dilakukan secara ketat. Begitu juga dalam hal penempatan anak yang ditahan sebagian dari mereka ditempatkan di Rutan dewasa.

c. Metode dan Pola Pembinaan

Metode dan pola pembinaan yang diberikan kepada anak yang ditahan untuk kepentingan pemeriksaan atau perjalanan proses peradilan terlihat berbeda dengan ditahan sebagai realisasi putusan pengadilan (anak binaan). Penahanan anak guna kepentingan pemeriksaan dan proses peradilan sangat kecil prosentasenya yang mengandung pembinaan dan perlindungan hak-hak anak, karena penekanan dari penahanan ini, adalah identik dengan penahanan orang dewasa yang diproses, yaitu agar si anak tidak melarikan diri karena takut atau akan mengulangi lagi perbuatan penyimpangan yang dilakukannya. Bahkan tidak mustahil penahanan yang dilakukan ini, tidak mengandung pola pembinaan sama sekali, karena anak yang ditahan tersebut penempatannya disatukan dengan tahanan dewasa dan perlakuahnyapun disamakan dengan tahanan dewasa.

#### d. Kinerja Aparat

Masih belum secara keseluruhan perlindungan hak-hak anak yang dirumuskan secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan terwujud dalam praktek, dikarenakan kinerja aparat yang kurang memadai. Kinerja aparat yang kurang memadai ini disebabkan karena :

- (1) Sumber daya manusia aparat relatif rendah sehingga kerja yang ditunjukkan kurang profesional. Harus ada pelatihan yang khusus bagi aparat (polisi, jaksa, hakim) untuk dapat menangani perkara anak. Namun hal ini belum sepenuhnya terwujud.
- (2) Lemahnya pemahaman aparat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan aparat terhadap perlindungan hukum bagi anak yang ditahan. Hal ini tergambar dari kekakuan aparat dalam merefleksikan hak-hak anak yang ditahan, sehingga timbul kesan aparat yang menangani penahanan anak tidak menguasai peraturan yang ada.
- (3) Sebagai manusia pada umumnya yang mempunyai sisi-sisi kelemahan, emosionalitas aparat kadang-kadang sulit dikendalikan bila berhadapan dengan tingkah laku-tingkah laku anak yang susah diatur dalam tahanan, sehingga tidak jarang aparat berperilaku kasar. Hal ini juga dikarenakan bahwa penahanan yang dilakukan bukan sebagai upaya terakhir namun lebih cenderung dilakukan agar anak tidak melarikan diri.

## 2. Kendala Terhadap Pidana Perampasan Kemerdekaan

### a. Bidang perundang-undangan

Sebagai muara dari kebijakan formulasi, maka kendala pada bidang perundang-undangan ini lebih terfokus pada banyaknya pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh hakim pada anak. Salah satu penyebabnya adalah adanya perumusan tunggal dalam delik yang dituduhkan pada anak, sehingga tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lain selain pidana perampasan kemerdekaan. Lain halnya jika dalam delik yang dituduhkan tersebut mengandung perumusan ganda, dalam arti adanya alternatif lain selain penjatuhan pidana, misalnya tindakan atau denda. Disamping tidak adanya pedoman penjatuhan pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak-anak ini, juga menyebabkan pada banyaknya penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan bagi anak. Juga belum adanya hak-hak khusus bagi anak yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Kalaupun ada, hanya sebagian saja yang dapat dilaksanakan, jadi tetap saja adanya pembatasan gerak ruang bagi anak yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

### b. Bidang sarana dan prasarana

Bidang sarana dan prasarana yang menjadi kendala di sini adalah ruang yang sempit dan ventilasi udara yang kurang, sementara kuantitas jumlah anak binaan dalam satu sel cukup banyak dan bervariasi. Kondisi fisik sel bagi anak yang dirampas kemerdekaannya ini merupakan salah



satu gambaran, bahwa perlindungan hukum bagi anak kurang mendapat perhatian.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah terbatasnya Lapas Anak pada suatu wilayah tertentu ini memungkinkan anak yang telah dijatuhi putusan untuk menjalankan hukuman dalam suatu lembaga disatukan dengan Lapas Dewasa. Sejumlah 42 % (dari 1669 jiwa) anak binaan masih ditempatkan atau dilembagakan bersama-sama dengan orang dewasa.<sup>133</sup>

Selain itu sarana dan prasarana lainnya, yang menjadikan perlindungan bagi anak belum menunjukkan hasil yang maksimal adalah sarana yang tersedia dalam lembaga itu sendiri sebagai penunjang proses pembinaan, yaitu :

- 1) Sarana pendidikan yang seadanya (khusus untuk Plantungan sarana pendidikan tidak ada, juga mengingat keadaan di Plantungan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Oleh karenanya yang diberikan pada anak binaan adalah ketrampilan), sementara di Kutoarjo terdapat gedung yang dimanfaatkan sebagai tempat belajar paket A atau Paket B.
- 2) Sarana olah raga, pada umumnya adalah lapangan bola kaki, dengan memanfaatkan lapangan/tanah kosong yang ada di lokasi lembaga.

#### c. Metode dan Pola Pembinaan

Metode dan pola pembinaan bagi anak yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan berbeda dengan anak yang dirampas

<sup>133</sup> Data Sub Cluster VIII/2 Children in Conflict With The Law, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 2000.

kemerdekaannya karena ditahan. Perampasan kemerdekaan terhadap anak yang dilakukan oleh Lapas sebagai realisasi dari putusan hakim, secara teknis dan praktis mengandung unsur pembinaan. Walaupun demikian pembinaan yang dilakukan oleh Lapas belum memperhatikan karakteristik-karakteristik tertentu dari tiap-tiap anak, dan juga tidak didasarkan pada modus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tidak mengherankan bila pada anak-anak tertentu, pola pembinaan yang diberikan oleh Lapas tidak meninggalkan bekas yang positif.

Melalui tabel 3 berikut digambarkan bagaimana tanggapan napi anak Kutoarjo terhadap pola pembinaan yang diberikan oleh Lapas Kutoarjo

**Tabel 3**  
**REKAPITULASI TANGGAPAN ANAK BINAAN TERHADAP**  
**PEMBINAAN YANG DIBERIKAN OLEH LAPAS**  
**PER-NOPEMBER 2000**

NO	TANGGAPAN	Jumlah	PROSENTASE
1	Baik	17	36.17 %
2	Sedang	23	48.93 %
3	Tidak Baik	7	14.9 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : diolah dari Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa terhadap pola pembinaan yang diberikan oleh Lapas kepada anak binaan anak tergolong dalam kategori sedang dengan prosentase yang ditunjukkan sebesar 48,95 %. Serta dalam kategori baik sebesar 36, 17 %. Sedangkan 14,90 % anak binaan tersebut memberikan penilaian yang kurang terhadap pola pembinaannya.

#### e. Kinerja Aparat

Masih belum keseluruhan perlindungan hak-hak anak yang dirumuskan secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam praktek. Dikarenakan kinerja aparat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak kurang memadai.

Kinerja aparat lembaga yang kurang memadai ini, antara lain disebabkan oleh :

- 1) Sumber daya manusia aparat yang relatif rendah sehingga kerja yang ditunjukkannya kurang profesional. Sumber daya ini bisa dilihat dari pendidikan yang dimilikinya. (hanya berijazah SLTP atau SLTA). Kalaupun ada yang berpendidikan sarjana, namun tidak sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi pekerjaannya. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali aparat Lapas yang berpendidikan sesuai dengan bidang pembinaan anak. (misalnya psikiater, sarjana kependidikan dan sebagainya).<sup>134</sup>
- 2) Lemahnya pemahaman aparat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan aparat terhadap segi-segi perlindungan anak dalam proses peadilan pidana anak. Lemahnya kualitas pemahaman materi atau substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini, tergambar dari kekakuan aparat di dalam merefleksikan hak-hak anak, sehingga timbul kesan aparat dalam menangani anak tidak menguasai peraturan yang ada.

<sup>134</sup> Wawancara dengan petugas Lapas Plantungan, 19 September 2000 dan wawancara dengan petugas Lapas Kutoarjo, 20 Nopember 2000.

### 3) Emosionalitas Aparat

Aparat adalah juga sebagai manusia pada umumnya mempunyai sisi-sisi kelemahan, salah satunya adalah emosionalitas yang kadang-kadang sulit dikendalikan bila berhadapan dengan tingkah laku - tingkah laku anak-anak yang susah diatur di dalam sel. Sehingga tidak jarang aparat berperilaku kasar (baik dalam tindakan maupun ucapan).

Tabel 4 berikut menggambarkan bagaimana tanggapan anak binaan Lapas Kutoarjo terhadap sikap dan tindakan aparat Lapas Kutoarjo.

**TABEL 4**  
**REKAPITULASI TANGGAPAN ANAK BINAAN**  
**TERHADAP SIKAP DAN TINDAKAN APARAT LAPAS**  
**PER NOPEMBER 2000**

NO	TANGGAPAN	Jumlah	PROSENTASE
1	Baik	9	11.16 %
2	Sedang	28	59.57 %
3	Tidak Baik	10	29.27 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : diolah dari Data Primer

Terhadap sikap dan tindakan aparat Lapas terhadap anak binaan ini dari tabel dapat terlihat bahwa tindakan aparat tersebut termasuk dalam kategori sedang, yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 59,57 %. Sedangkan tindakan yang baik prosentasenya sebesar 11,16 % dan yang tidak baik prosentasenya sebesar 29,27 %.

### 4) Pelayanan yang diberikan

Perlindungan hak-hak anak merupakan kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk memenuhinya. Tanggung jawab negara cq Lapas anak ini secara yuridis telah dirumuskan dalam berbagai konvensi-konvensi

internasional maupun undang-undang nasional. Secara eksplisit kita melihat bahwa anak-anak yang dirampas kemerdekaannya memperoleh pelayanan, tetapi bila lebih jauh lagi kita melihat apakah jenis dan bentuk pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan kualitas hak-hak anak yang dilindungi, maka jawabannya adalah belum.

Sebagai contoh dari uraian di atas, adalah pelayanan kesehatan anak.

Setiap anak binaan memang mendapatkan pelayanan ini pada saat sakit, namun yang diberikan kepada anak untuk kesehatannya, bukanlah dokter, melainkan hanya pelayanan kesehatan oleh seorang mantri atau pelayanan dengan obat-obatan seadanya hal ini mengingat keterbatasan dana yang ada.<sup>135</sup> Sebetulnya untuk pelayanan kesehatan terhadap anak binaan ini

harus dilakukan secara rutin setiap minggunya untuk mengetahui keadaan kesehatan anak binaan . Jika penyakit anak tersebut berat dan memang harus dirawat di rumah sakit, maka barulah si anak dirawat inap di rumah sakit. Terhadap pelayanan kesehatan ini dalam instrumen internasional yang mengatur tentang perlindungan anak yang kehilangan kebebasan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan oleh seorang dokter secara rutin (Rule 50) untuk menentukan kondisi fisik anak tersebut.

Tanggapan anak binaan Lapas Kutoarjo terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan digambarkan dalam tabel 5 berikut :

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan petugas Lapas Plantungan, Kendal 19 September 2000 dan wawancara dengan petugas Lapas Kutoarjo, Purworejo 20 Nopember 2000.

**TABEL 5**  
**REKAPITULASI TANGGAPAN ANAK BINAAN**  
**TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PER-NOPEMBER 2000**

NO	TANGGAPAN	Jumlah	PROSENTASE
1	Baik	5	10,65 %
2	Sedang	32	60,08 %
3	Tidak Baik	5	29,27 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : diolah dari Data Primer

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terhadap pelayanan kesehatan anak binaan ini termasuk dalam kategori sedang dengan prosentase sebesar 62,86 % dan untuk kategori baik sebesar 17,14 %, serta 20 % untuk kategori tidak baik. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap anak binaan sudah diupayakan sebaik mungkin.

Disamping kendala-kendala di atas terdapat kendala lainnya yang menyebabkan perlindungan hak-hak anak yang dijamin pidana perampasan kemerdekaan belum dapat dikatakan maksimal dalam perwujudannya, adalah karena kendala yang datangnya dari anak-anak binaan sendiri, yang terkadang malas-malasan, bosan dan tidak serius di dalam menerima pelayanan. Seperti : ketidakseriusan anak dalam mengikuti pendidikan kejar paket ataupun pendidikan ketrampilan yang diberikan kepada anak. Sementara dari Lembaga Pemasyarakatan Anak sendiri, munculnya permasalahan-permasalahan di dalam memberikan hak-hak anak meliputi 3 (tiga) persoalan pokok yaitu :

- a. Distribusi pendanaan yang relatif minim dari pemerintah untuk pemenuhan segala kebutuhan anak secara utuh;
- b. Peraturan perundang-undangan yang hanya merumuskan kewajiban pembinaan, tetapi sarat akan hak dari Lembaga Pemasyarakatan. Seperti

untuk mengelola sendiri sumber dana (finansial) yang dibutuhkan. Kondisi ini menempatkan Lembaga Pemasyarakatan Anak hampir "identik" dengan Panti Sosial, yang untuk memenuhi kebutuhan, terkadang harus (terpaksa) mempergunakan tenaga anak binaan; dan

- c. Aparat Lapas, yang disamping minim jumlahnya juga sedikit yang mempunyai wawasan keilmuan tentang segi-segi anak dalam kehidupannya.

Tabel 6 berikut ini menunjukkan penilaian aparat Lapas Kutoarjo terhadap sikap dan tindakan anak-anak binaan, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

**TABEL 6**  
**REKAPITULASI PENILAIAN APARAT LAPAS KUTOARJO**  
**SEHUBUNGAN SIKAP DAN TINDAKAN ANAK BINAAN**  
**PER-NOPEMBER 2000**

NO	TANGGAPAN	Jumlah	PROSENTASE
1	Baik	8	22,85 %
2	Sedang	20	57,14 %
3	Tidak Baik	7	20.01 %
Jumlah		35	100 %

Sumber : diolah dari data primer

Tabel 5 menunjukkan bahwa kebanyakan dari anak binaan tersebut sikap dan tindakannya termasuk dalam kategori sedang dengan prosentase sebesar 57,14 %. Dan termasuk dalam kategori baik dengan prosentase sebesar 22,85 %, sedangkan terhadap sikap dan tindakan dari anak binaan yang tidak baik prosentasenya sebesar 20,01 %.

Pengaturan jadwal aktifitas dari anak juga merupakan kendala di dalam pemberian pelayanan dalam perlindungan hak-hak anak. Pola penyusunan

aktifitas anak yang monoton menempatkan suasana kehidupan anak di Lapas Kutoarjo terlihat sebagai sebuah aktifitas kehidupan yang monoton. Padahal belum tentu aktifitas tersebut tepat untuk setiap anak. Gambaran tentang aktifitas anak di Lapas Kutoarjo selengkapnya digambarkan dalam tabel 7 berikut ini :

**TABEL 7**  
**JADWAL AKTIFITAS ANAK BINAAN SETIAP HARI**  
**DI LAPAS KUTOARJO**

NO	AKTIVITAS	WAKTU	%	KETERANGAN
1	Aktivitas Pribadi	4	16.66	
2	Olah raga	1	4.16	Hari jum'at senam pagi selama satu jam bersama pegawai LAPAS
3	Ketrampilan atau PBA	4.5	18.75	
4	Istirahat	2.5	10.41	
5	Ibadah dan TPA	2	8.33	Sholat Jum'at bersama
6	Rekreasi	1.5	6.25	Nonton Televisi
7	Tidur	8.5	35.44	
Jumlah		24 jam	100 %	Anak binaan diwajibkan piket kelompok untuk memasak secara bergilir

Sumber : diolah dari Data Primer

Terhadap aktifitas dari anak binaan sehari-hari ini menunjukkan bahwa aktivitas terbesar yang dilakukan adalah pendidikan ketrampilan dan Kejar Paket A/B, yaitu selama 4,5 jam setiap harinya dengan prosentase sebesar 18,75 %. Sedangkan untuk aktifitas ibadah, olah raga dan rekreasi masing-masing dengan prosentase sebesar 8,33 % ; 4,16 % ; dan 6,25 %. Kebutuhan anak untuk berinteraksi dengan sesama anak binaan dalam kelompok, tanpa pengawasan petugas, merupakan suatu kebutuhan yang perlu diperhatikan. Selama ini anak merasa selalu diawasi oleh petugas dan petugas selalu berprasangka buruk, tidak percaya, dan penuh kecurigaan terhadap anak-anak penghuni lembaga . Kondisi ini membuat mereka merasa rendah diri, dan trauma akibat perlakuan yang



diterimanya. Untuk itu aktifitas rekreasi bagi anak binaan ini sangat dibutuhkan sekali, namun sebetulnya rekreasi ini bukan dalam arti yang sesungguhnya untuk pergi bertamasya seperti anak-anak pada umumnya, melainkan rekreasi di sini adalah kesempatan untuk menonton televisi dengan waktu yang dibatasi.

### **C. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Penahanan dan Pidana Perampasan Kemerdekaan**

Dalam menguraikan pembahasan atas masalah ketiga ini, terlebih dahulu harus diperhatikan persoalan-persoalan yang melingkupi pemberian “perlindungan hukum” (baik secara yuridis maupun berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia) yang menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan instrumen-instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Antara lain dikarenakan belum sepenuhnya materi dari instrumen internasional dijabarkan dalam peraturan perundangan-undangan nasional, maka dibutuhkan langkah kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Langkah kebijakan pemberian perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dimulai pada saat anak ditempatkan di dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan saja, melainkan juga meliputi sebelum proses peradilan pidana diterapkan pada anak. Bahkan sebelum kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi. Hal ini dikemukakan penulis untuk menunjukkan bahwa pada tahap kebijakan seharusnya dilakukan oleh pemerintah (penentu kebijakan) hendaknya dimulai dari :

UPT-PUSTAK-UNDIP

a. Penentuan kebijakan pada tahap formulasi, pada tahap ini kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang terorientasi kepada :

- 1) penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang penahanan dan perampasan kemerdekaan (hukum pidana formil dan materiil).<sup>136</sup>
- 2) memberikan dasar bagi bekerjanya komponen dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berhadapan langsung dalam rangka pembinaan anak binaan .

b. Penentuan kebijakan pada tahap aplikasi

Pada tahap ini kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang terorientasi kepada :

- 1) Penciptaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dan terpadu.<sup>137</sup>
- 2) Untuk menyeimbangkan prosedur dengan proses di dalam perlindungan hukum terhadap anak.<sup>138</sup>
- 3) Kebijakan yang diorientasikan kepada tumbuhnya mentalitas dan profesionalitas aparat di dalam melakukan pembinaan terhadap anak.

<sup>136</sup> Hukum pidana materiil, sebenarnya merupakan titik awal penyelenggaraan administrasi peradilan pidana (the administration of justice). Sedangkan bidang hukum lain, yakni hukum pidana formil (law of criminal procedure) dan hukum pelaksanaan pidana, pada hakekatnya merupakan kelanjutan operasionalisasi dari hukum pidana substantif tersebut. Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, 24 Februari 1990.

<sup>137</sup> Sistem Peradilan Pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas). Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, BP-UNDIP, Semarang, 1995 hal. vii.

<sup>138</sup> Hal tersebut penulis kemukakan berdasarkan bahwa dalam praktek aparat (Lembaga Pemasyarakatan Anak) terkadang melakukan penyimpangan di dalam mengambil dan menentukan tindakan anak.

c. Kebijakan dalam tahap eksekusi

Pada tahapan ini kebijakan yang seharusnya dirumuskan adalah kebijakan yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak anak yang dirampas kemerdekaannya baik pada saat ditahan maupun sebagai realisasi dari putusan hakim.

Penjabaran masing-masing kebijakan di atas secara sistematis diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Formulasi

Dalam menguraikan pokok-pokok kebijakan yang ditempuh pada tahap formulasi dalam perlindungan hukum bagi anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan ini, dilakukan analisis terhadap produk perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan anak baik sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3/1997 maupun setelah berlakunya Undang-Undang No.3/1997. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan pada tahap formulasi.

1) Kebijakan formulasi sebelum berlakunya Undang-Undang No.3/1997

Sebelum Undang-Undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, maka peraturan yang dipergunakan terhadap kasus anak yang terjadi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Batasan umur terhadap anak pelaku tindak pidanaupun tidak jelas, dalam KUHP hanya disebutkan belum berumur enam belas tahun. Semua kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini juga diberlakukan untuk anak-anak. Namun

dalam Pasal 45 disebutkan bahwa terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 terhadap anak pelaku akan dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Jadi tidak adanya pengkategorisasian secara khusus dan jelas terhadap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP.

Hal lain yang menarik adalah terhadap pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak, yaitu jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, jika perbuatan yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa semua tindak pidana yang ada di KUHP berlaku juga bagi anak.

Sedangkan mengenai penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana ini adalah mengikuti prosedur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi disini berlaku ketentuan penahanan terhadap anak-anak yang disamakan dengan tahanan orang dewasa.

## 2) Kebijakan formulasi setelah berlakunya Undang-Undang No.3/1997

Undang-Undang No. 3/1997 ini dapatlah dikatakan sebagai produk peraturan yang berusaha mengatasi persoalan yang timbul dalam sistem peradilan pidana yang khusus ditujukan bagi anak. Hal ini tidak terlepas

dari prinsip-prinsip yang mendasari muatan materi peraturan tersebut, yaitu:<sup>139</sup>

- a) Bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak harus senantiasa tetap konsisten dan konsekuen dengan cita hukum, sistem hukum, tatanan hukum, dan peradilan, serta tata tertib hukum, baik yang bersifat filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- b) Bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tidak bermaksud dan tidak mempunyai ketentuan-ketentuan, baik secara langsung atau tidak langsung hendak memaksakan atau menerapkan aturan-aturan hukum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku bagi pencari keadilan;
- c) Bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dengan sadar, demi kepentingan kesejahteraan anak, berkehendak mengatur secara integral kepentingan kesejahteraan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku baginya dan sesuai pula dengan wewenang atau kekuasaan peradilan yang melindunginya.

Langkah maju dari adanya peraturan ini adalah adanya batasan umur yang pasti bagi “anak nakal” yaitu 8 – 18 tahun. Sedangkan untuk tenggang waktu penahanannyapun sudah mempunyai pedoman tersendiri, yang lamanya penahanan lebih singkat daripada yang tercantum dalam KUHAP. Mengenai pidana perampasan kemerdekaannya yang terdiri dari penjara dan kurungan yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari maksimum pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa, serta untuk pidana yang

---

<sup>139</sup> Sambutan Pemerintah terhadap persetujuan DPR-RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, Risalah Undang-Undang Pengadilan Anak Buku II, Op.Cit, hal. 1014.

diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka yang dapat dijatuhkan adalah maksimum 10 tahun.

Walaupun sebagai terobosan baru, namun prinsip penahanan yang dipergunakan masih sama yaitu bahwa penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, dan bukan sebagai upaya yang terakhir seperti apa yang diamanatkan oleh standar internasional.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka langkah yang diambil antara lain meliputi :

- 1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak pada masa tahanan dan pidana perampasan kemerdekaan. Penyempurnaan peraturan ini terutama sekali yang menyangkut masa penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan bagi anak, yang tidak dilakukan sebagai upaya yang terakhir. Dengan demikian nantinya kebijakan yang diharapkan adalah bahwa penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan itu ditujukan sebagai upaya yang terakhir, serta tidak dilakukan demi kepentingan pemeriksaan. Kenyataannya hampir semua pelaku tindak pidana anak dari yang ringan sampai yang terberatpun dilakukan penahanan, tanpa melihat akibat dampak negatif dari jiwa si anak yang pertama kali ditahan.
- 2) Penjabaran dan perumusan instrumen-instrumen internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dengan dimasukkannya diversi (pembiasan), dengan demikian hakim setiap saat dapat menghentikan proses peradilan kapan saja tanpa menjatuhkan sanksi

apapun. Diversi ini merupakan *a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*.

- 3) Merumuskan dalam peraturan perundang-undangan nasional pedoman penjatuhan pidana bagi hakim dan pedoman untuk penahanan bagi anak.
- 4) Perlunya dirumuskan secara khusus mekanisme bekerjanya perlindungan anak yang melibatkan komponen-komponen di luar Sistem Peradilan Pidana. Untuk itu agar pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau dibentuknya suatu badan atau lembaga yang khusus mengkaji terhadap pelaksanaan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pada saat nantinya lembaga inilah yang akan memberi masukan pada pemerintah agar dapat dirumuskan materi perundang-undangan yang baik.

#### **b. Tahap Aplikasi**

Sebelum mengemukakan konsep kebijakan pada tahap aplikasi ini akan dikemukakan kasus yang terjadi sehubungan dengan penahanan terhadap seorang anak, sehingga dapat dideskripsikan kebijakan apa yang nantinya diperlukan.

Menarik sekali mencermati kasus yang terjadi di Yogyakarta, terhadap seorang anak yang bernama AA berumur belum genap 9 tahun penduduk Tegalgendu, Kotagede, Yogyakarta yang ternyata terbukti pada tanggal 29 April 1995 mencuri dua ekor burung seharga Rp. 4.000,- milik saksi Akhid Widirahmanto. Proses penyidangannya berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tertutup, para petugas tidak berpakaian dinas, dan tuntutan Jaksa juga sesuai

aturan,<sup>140</sup> yang menjadi permasalahan adalah bahwa anak tersebut telah ditahan selama 52 hari, oleh Polsekta Kotagede selama 45 hari dan 7 hari di LP Wirogunan.<sup>141</sup>

Setumpuk permasalahan muncul menanggapi kasus ini, dan semuanya mempermasalahkan hak asasi anak. Mengapa anak ini harus ditahan sedemikian lama, kalau toh harus ditahan, dimanakah ia seharusnya ditahan dalam sel atau dalam “detention home”. Seandainya polisi telah melakukan kesalahan dalam menahan anak ini, apakah jaksa harus juga melakukan kesalahan yang sama dengan memperpanjang penahanannya, bahkan mengalihkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, belum lagi telah terjadi penyiksaan terhadap anak ini (ada bukti bekas luka).<sup>142</sup>

Menanggapi kasus yang dialami oleh AA tersebut jelas sekali telah melanggar hak-hak anak atas kebebasan pribadinya (deprivation of liberty). Melihat lamanya tahanan yang dialami jelas sekali telah melanggar hukum,<sup>143</sup> belum lagi tempat penahanannya di LP Wirogunan yang merupakan LP dewasa.

Hal ini akan membawa dampak yang tidak sedikit pada anak tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penjara LP sering dianggap sebagai “school of crime”, sehingga penempatan AA di LP Wirogunan tersebut tidak tepat, karena sedikit banyak akan mempengaruhi watak dan kejiwaannya. Ia akan melihat, apa yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya, yaitu kehidupan para napi, dan ia akan

<sup>140</sup> Koesparmono Irsan, *Peranan Masyarakat dan Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak*, Semiloka Draft RUU Perlindungan Anak, kerjasama FK-PPAI dan UNICEF, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.

<sup>141</sup> Kompas 20 Juni 1995.

<sup>142</sup> Koesparmono Irsan, *Op.Cit.*

<sup>143</sup> Kejadian tersebut sebelum disahkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun tidak menutup kemungkinan dipergunakannya peraturan lain yang sesuai maupun standar internasional yang ada untuk menggugat hak-hak anak yang dilanggar tersebut.



mendengar apa yang didengarnya di LP, yang sebelumnya tidak pernah ia dengar, serta kemungkinan akan ditirunya tingkah laku dari para napi tersebut.

Mencermati timbulnya praktek-praktek yang menyimpang dalam penerapan peraturan yang telah ditentukan ini, dikarenakan pelaku dalam sistem peradilan pidana belum bisa menterjemahkan apa yang terkandung dalam makna peraturan tersebut, dan hanya sebatas memahami apa yang tertulis dalam peraturan tersebut. Kebanyakan praktek penyimpangan ini dilakukan oleh petugas yang keliru menterjemahkan peraturan dan karena terdesak oleh situasi dan kondisi yang ada.

Dalam praktek masih dijumpai adanya tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa, dengan alasan terbatasnya ruang tahanan yang khusus untuk anak. Padahal sebetulnya untuk anak-anak yang ditahan ini harus ditempatkan di ruang yang khusus, mengingat dampak yang timbul nantinya jika disatukan dengan tahanan dewasa. Penahanan terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana ini merupakan pintu pertama untuk memasuki gerbang sistem peradilan pidana, yang akan membekas pada anak. Untuk itu diusahakan tidak melakukan penahanan sekiranya dapat diupayakan usaha lain (misal : tahanan rumah, pengawasan dan sebagainya). Dengan demikian diharapkan penahanan tersebut sebagai upaya terakhir (last resort).

Dalam proses peradilan pidana hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan terhadap anak yang ditangkap oleh polisi, maka sejak itu perlakuan khusus terhadapnya dilakukan yaitu :

- 1) Tanya jawab identitas anak dilakukan dengan didampingi oleh orang tua atau penasihat hukumnya;
  - 2) Tempat wawancara (pengusutan), seyogyanya dilakukan di tempat yang sederhana, tidak tercampur dengan tempat pengusutan orang dewasa, di mana suasana aman dan tenteram ada sehingga anak tidak takut dan mudah menjawab pertanyaan yang diajukan;
  - 3) Pertanyaan yang diajukan hendaknya jangan dilakukan dengan kekerasan atau tekanan yang dapat menimbulkan ketakutan pada anak;
- b. Pemeriksaan di pengadilan, hendaknya dilakukan dengan:
- 1) Tempat sidang tidak boleh disatukan dengan tempat peradilan dewasa dan tempat sidang seyogyanya bukan merupakan ruang sidang seperti untuk orang dewasa, sederhana tetapi berkesan;
  - 2) Suasana tenteram, tidak ramai, sehingga anak merasa aman dan dapat mengutarakan jawaban-jawabannya secara baik, begitu juga saksi, orang tua, wali atau pengasuh;
  - 3) Sidang sifatnya yang tertutup dan hanya yang bersangkutan boleh menghadirinya kecuali dengan ijin hakim. Pers sedapat mungkin dihindari dan jika diperbolehkan maka identitas anak dan keluarganya disamarkan;
  - 4) Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang paling dapat dimengerti oleh anak;
  - 5) Setiap anak boleh mengajukan pembela;
  - 6) Bilamana diperlukan, saksi dapat dihadirkan pada saat sidang.
- b. Pengambilan Keputusan oleh hakim hendaknya :

- 1) Berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada hasil wawancara antara anak dengan hakim atau jaksa, maupun keterangan dari saksi-saksi. Dengan demikian dapat disimpulkan kedudukan anak dan kekhilafannya dengan sebab-sebab serta latar belakangnya.
- 2) Hakim setelah mendengar tuntutan jaksa dan saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan (petugas Bapas) dan atas permintaan dari anak atau orang tuanya, maka hakim dapat memutus perkara tersebut berdasarkan keyakinannya.

Sama halnya dengan penahanan, dalam proses peradilan hampir semua putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana perampasan kemerdekaan. Walaupun sebetulnya hal ini tidak efektif, jika pidana yang dijatuhkan terlalu singkat, bahkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikis anak.

Sehubungan dengan timbulnya kasus tersebut dalam praktek sistem peradilan pidana anak ini maka langkah kebijakan yang dapat diambil adalah :

- 1) Terhadap anak yang ditahan dalam proses peradilan pidana (tahap aplikasi), kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah menempatkan anak dalam ruang tahanan yang khusus diperuntukkan bagi anak sehingga tidak menyatu dengan tahanan dewasa, karena hal ini dapat memancing anak untuk melakukan tindakan yang berlebihan;
- 2) Penegasan kembali koordinasi diantara komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya yang berkaitan dengan administrasi perkara. Kondisi ini penulis kemukakan agar tidak lagi terjadi penahanan yang melampaui batas maksimum yang ditentukan seperti pada kasus yang telah

dikemukakan di atas. Serta koordinasi di dalam praktek, agar semua pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana dapat memantau sampai pada pelaksanaan putusan.<sup>144</sup>

- 3) Penegasan kembali tentang peran Bapas dalam setiap proses peradilan pidana yang ditujukan bagi anak. Hal ini penulis kemukakan atas dasar di dalam praktek pemeriksaan yang dilakukan dan putusan yang diberikan pada anak, masih cenderung tidak didasarkan kepada penilaian Bapas, ini menunjukkan belum berperannya fungsi Bapas dalam Sistem peradilan Pidana.<sup>145</sup>

#### c. Tahap Eksekusi

Sebelum mengemukakan tahap kebijakan pada bagian eksekusi ini, terlebih dahulu akan dikemukakan data mengenai pidana perampasan kemerdekaan yang telah dijatuhkan oleh hakim selama kurun waktu 1997-1999 adalah :<sup>146</sup>

- 1) Data tahun 1997 yang ada menunjukkan bahwa dari seluruh tambahan narapidana anak, sebesar 99,3 % diberi putusan pidana penjara, dan hanya 0,7 % yang diberi putusan pidana kurungan pengganti denda. Dari total anak terpidana penjara, 90 % anak terpidana penjara harus menjalani hukuman selama kurang dari satu tahun. Sisanya, yaitu 8,8 % anak terpidana penjara harus mendekam di dalam sel penjara selama 1-5 tahun, dan sebesar 1,2 % harus menjalani masa hukuman penjara lebih dari 5 tahun;

<sup>144</sup> Dalam prakteknya pihak kepolisian jarang sekali bahkan tidak pernah menerima tembusan surat telah dilaksanakannya putusan pengadilan. Wawancara dengan Polisi, Poltabes Semarang 21 Nopember 2000.

<sup>145</sup> Wawancara dengan petugas Bapas, Semarang 10 Agustus 2000.

<sup>146</sup> Data putusan hakim di Indonesia, Clusster VIII/2 : *Children in Conflict With The Law*, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta 1999, hal. 10.

- 2) Data tahun 1998 memperlihatkan bahwa dari seluruh tambahan narapidana anak, 98,7 % diberikan putusan hukuman penjara, dan hanya 12,3 % yang diputus dengan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Dari total anak yang diputus dengan pidana penjara, 87,6 % dihukum pidana penjara selama kurang dari satu tahun, 10,5 % anak terpidana penjara harus menjalani masa hukuman selama lebih dari 5 tahun.
- 3) Data tambahan napi anak pada tahun 1999, menunjukkan bahwa anak yang diputus oleh pengadilan dengan pidana penjara, adalah sebesar 99,78 %, sedang sisanya diputus dengan pidana kurungan pengganti denda. Dari seluruh anak terpidana penjara, sebagian besar diputus untuk menjalani pidana penjara selama kurang dari satu tahun (88,5 %), dan 9,9 % harus menjalani pidana penjara selama 1 – 5 tahun, serta sisanya 1,6 % harus menjalani hukuman penjara lebih dari 5 tahun.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah anak yang dirampas kemerdekaannya berdasarkan periode pemenjaraan, akan terlihat bahwa sebagian besar anak yang dilembagakan mendapat putusan pidana lebih dari satu tahun penjara. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa Hakim anak dalam memutus perkara masih disemangati oleh pentingnya memberikan putusan pidana penjara kepada anak-anak daripada kurungan pengganti denda. Meskipun hakim anak tersebut lebih banyak memberi putusan pidana penjara, namun lamanya kurang dari satu tahun. (semakin kecil prosentasenya).

Melihat kenyataan tersebut, maka paling tidak dapat ditetapkan langkah kebijakan apa yang nantinya dipergunakan untuk mengantisipasi kejadian-

kejadian yang luar biasa yang tidak diinginkan. Kebijakan yang dapat ditempuh disini sehubungan dengan masalah pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak harus mempertimbangkan berbagai hal, baik fisik, mental, maupun kejiwaan anak tersebut. Jangan sampai justru akan memperparah keadaan. Hanyalah terhadap tindak pidana tertentu saja yang sekiranya terpidana anak tersebut dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

Terhadap pidana perampasan kemerdekaan, kebijakan yang dapat diambil adalah selain mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi anak-anak jika dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, juga diupayakan bahwa pidana tersebut adalah sebagai suatu upaya yang terakhir (last resort).

Proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak terhadap anak yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, secara administratif merupakan proses yang berada di luar mekanisme peradilan pidana. Untuk itu dapat dikatakan bahwa aktifitas yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan aktifitas purna-adjudikasi. Akan tetapi bila kita menempatkan Lembaga Pemasyarakatan Anak ini sebagai satu sub sistem ataupun komponen dari sistem peradilan pidana, maka segala bentuk persoalan yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak seharusnya dibebankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak itu sendiri. Disamping eksistensinya sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan, yang menempatkan baik buruknya kinerja yang ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan Anak juga tidak terlepas dari keputusan yang ditetapkan hakim (pengadilan).

Berkaitan dengan gambaran di atas Muladi mengemukakan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) harus dilihat sebagai *"the network of court and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement"*.<sup>147</sup>

Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut menunjukkan, bahwa SPP, merupakan keseluruhan proses dalam mewujudkan satu tujuan yaitu tujuan SPP (termasuk di dalam proses ini adalah kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan Anak).

Disamping itu, Lembaga Pemasyarakatan Anak, merupakan bagian dari organ pemerintah, yang secara struktural keberadaannya berada di bawah pengaruh dari pemerintah. Oleh karenanya, baik buruknya kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak, sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh sejauhmana kebijakan yang dilakukan dan diterapkan pemerintah terhadap Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut.

Bertolak dari gambaran Lembaga Pemasyarakatan yang diuraikan di atas, maka peguraian langkah kebijakan yang dimaksud dalam sub ini dilakukan dari dua sudut pandang yaitu :

- a) Dari sisi keberadaan lembaga pemasyarakatan anak dalam Sistem Peradilan Pidana;
- b) Dari sisi keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam struktur pemerintah.

Adapun langkah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dirampas

---

<sup>147</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal. 15.

kemerdekaannya, berdasarkan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak di atas diuraikan sebagai berikut :

a) Langkah kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Satu pokok persoalan yang mendapat perhatian sehubungan dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam SPP, adalah bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam SPP dapat mendukung proses yang terjadi di dalamnya, sampai kepada proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karenanya kebijakan awal yang patut dilakukan adalah bagaimana menempatkan komponen atau tahapan-tahapan dalam peradilan pidana anak tersebut merupakan satu proses peradilan yang bersifat terpadu, yang tidak hanya berorientasi pada pemberian pengajaran bagi anak sebagai suatu balasan terhadap penyimpangan yang dilakukannya. Tetapi lebih dari itu, adalah agar proses peradilan pidana anak, merupakan bagian internal dari proses pembangunan nasional yang tujuannya adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa), yaitu : "dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial"<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Barda Nawawi Arief, III, *Op.Cit.*, hal. 76.



Kebijakan yang dilakukan hendaknya mengikat atau menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak hanya sekedar sebagai wadah pelaksana putusan dari eksekutor (Jaksa Penuntut Umum) terhadap putusan Pengadilan Negeri, namun lembaga pemasyarakatan mempunyai “kebebasan” untuk merumuskan satu kebijakan di dalam pembinaan anak. Pada saat ini kebijakan yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak berasal dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, melainkan dengan pengawasan dari eksekutor.

Dengan pokok-pokok pikiran di atas, maka secara umum kebijakan untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak, adalah kebijakan-kebijakan yang berorientasi dan didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan dari manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Konggres PBB ke 7 (1985) yang diselenggarakan di Milan – Italia, dimana dalam salah satu dari resolusi ke-2 Konggres tersebut ditegaskan “agar negara-negara anggota meningkatkan usaha-usaha untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari pidana penjara”.

Kebijakan lain yang harus diperhatikan adalah dalam metode pembinaan anak binaan agar dilakukan berbagai upaya guna memberikan pemulihan rohani dan jasmani anak. Untuk itu diupayakan adanya pembinaan di luar lembaga, seperti :

#### 1) Asimilasi

Yaitu proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Untuk anak binaan di Lapas Anak, kegiatan asimilasi ini biasanya diisi dengan kesempatan

bagi anak untuk bermain bola di lapangan luar bangunan, dan setelah selesai masuk kembali ke dalam bangunan. Sangat sempit maknanya jika dikaitkan dengan tujuannya untuk membaurkan anak kembali dalam masyarakat, namun hal ini sudah merupakan suatu usaha;

## 2) Pembebasan Bersyarat

Proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan ini didasarkan pada Pasal 15 dan 16 KUHPidana. Meskipun telah diatur undang-undang, tetapi pelaksanaannya pengurusan atau permohonan pembebasan bersyarat ini sangat sulit dilakukan.

## 3) Cuti Menjelang Bebas

Sebagai proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat karena masa atau sisa masa pidananya pendek.

## 4) Cuti mengunjungi keluarga

Adalah cuti yang diberikan kepada narapidana untuk mengunjungi keluarganya apabila terjadi suatu hal yang sangat mendesak.

## 5) Pengawasan

Yaitu keseluruhan langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas, termasuk didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Agar apa yang diharapkan tercapai maka sumber daya manusia dari kinerja aparat harus ditingkatkan. Kebijakan yang bisa dilakukan sehubungan

dengan masalah ini adalah mengadakan pelatihan atau penataran sumber daya manusianya itu sendiri dengan pembuatan program yang tepat dan terpadu dalam sistem peradilan pidana.

b) Langkah kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam struktur pemerintah

Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang muncul pada saat ini di masa datang maka diperlukan suatu kebijakan untuk mengantisipasinya. Dilihat dari struktur pemerintah, maka kebijakan yang perlu diambil adalah bahwa pengelolaan dana untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak seharusnya tidak melalui tahapan-tahapan sehingga anggaran tersebut terpotong-potong, yang pada akhirnya tinggal beberapa persen saja dari dana yang semestinya diterima.

Orientasi terhadap sumber daya manusia bagi aparat Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk masa datang janganlah terfokus kepada sarjana hukum saja, melainkan juga terkonfigurasi dari berbagai bidang disiplin ilmu (psikologi, pendidikan, ketrampilan dan sebagainya). Hal ini ditujukan untuk program pembinaan napi anak yang meliputi segala aspek. Untuk itu kebijakan pembinaan yang diharapkan pada masa datang anak terorientasi kepada individu anak yang bersangkutan (individualisasi pidana) dan tidak lagi diterapkan sistem paket untuk napi anak yang memiliki kekhususan pada pribadinya. Dengan demikian tidak mustahil tujuan dari individualisasi pidana terhadap napi anak nantinya akan tercapai.

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai akhir dari penelitian terhadap perlindungan hak-hak anak dalam tahanan dan pidana perampasan kemerdekaan, berikut ini dikemukakan :

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang ditahan dan dirampas kemerdekaannya, dengan memperbandingkan pengaturan yuridis dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan deklarasi, konvensi, dan instrumen-instrumen internasional lainnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai hasil dari perbandingan tersebut, adalah :

- a. Dari Segi Umur

Bahwa dengan ditetapkannya batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawab pidana (*criminal responsibility*), yaitu antara 8 sampai 18 tahun, walaupun tidak “persis sama” dengan batas umur yang terdapat pada ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, namun dikarenakan batas umur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional tersebut berada diantara batas umur yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan internasional, serta dikarenakan secara psikologis, batas usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan internasional dan nasional tersebut berada dalam satu ruang lingkup kategori perkembangan anak, maka dapat dikatakan bahwa perundang-undangan

nasional telah merujuk kepada ketentuan-ketentuan internasional dalam membatasi usia anak delinkuen.

Namun penetapan batas usia yang dilakukan oleh perundang-undangan nasional masih tergambar didasarkan kepada kondisi sosial budaya, belum tergambar dan mengacu kepada kemungkinan perkembangan-perkembangan sosial budaya yang mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku anak.

- b. Bahwa berdasarkan UU.No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, belum sepenuhnya memuat prinsip-prinsip peradilan baik, yang terdapat di dalam instrumen-instrumen internasional, seperti dalam hal pengaturan mekanisme peradilan pidana yang diterapkan kepada anak delinkuen, dan hanya mengatur tentang keberadaan aparat peradilan (secara fisik) di dalam mengadili atau memproses, tetapi belum mengatur secara jelas dan tegas tentang sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.
- c. Bahwa penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan hendaknya merupakan langkah yang terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Dengan demikian maka penempatan seorang anak pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan pilihan terakhir. Ketentuan ini sesuai dengan standar internasional, berbeda dengan perundang-undangan nasional bahwa penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan dijatuhkan dengan alasan untuk kepentingan proses peradilan.

2. Gambaran perlindungan hukum terhadap hak-hak anak-anak yang dirampas kemerdekaannya, baik karena ditahan atau sebagai realisasi dari putusan pengadilan, dalam praktek masih belum sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menggariskan tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak. Kondisi ini disebabkan oleh :
  - a. Bidang perundang-undangan yang ada sekarang ini belum sepenuhnya mencerminkan pemberian perlindungan hukum bagi anak yang ditahan dan dipidana perampasan kemerdekaan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang No.3/1997 sehingga aparat yang terkait hanya melaksanakan apa yang tersurat dalam peraturan tersebut, belum pada tahapan menterjemahkan maksud dari peraturan tersebut.
  - b. Kualitas sumber daya aparat lembaga yang terlalu kaku di dalam menafsirkan garis-garis perlindungan yang dirumuskan dalam undang-undang ;
  - c. Sarana dan pra-sarana pendukung perlindungan (pemenuhan) hak-hak anak masih bersifat umum, keumuman ini juga belum meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan anak dalam proses pembinaan dirinya (meliputi kondisi fisik ruang tahanan dan sarana pelayanan) ;
  - d. Emosionalitas aparat yang terkadang tidak sesuai dengan karakteristik (jiwa) dari anak yang ditahan dan dipidana perampasan kemerdekaan;
  - e. Latar belakang keilmuan aparat masih langka yang berasal dari bidang keilmuan tentang anak dan pendidikan.

Di samping kendala-kendala tersebut, terdapat kendala lain yang berasal dari anak yang ditahan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan sendiri (faktor internal anak), yang mengakibatkan pola atau metode pembinaan yang secara umum dilakukan terkadang tidak menyentuh bagi anak binaan. Kondisi ini digambarkan oleh sikap dan tindakan anak, yang :

- a. Merasa bosan ;
- b. Tidak serius ;

Munculnya sifat-sifat di atas, dikarenakan metode pembinaan yang dilakukan melalui aktivitas yang diberikan kepada anak bersifat monoton, tidak sesuai dengan hobi dan pendidikan anak.

- 3. Kebijakan perlindungan hukum bagi anak dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan yang bisa dilakukan adalah meliputi :

- a. Tahap Formulasi , dalam tahap ini kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah :

- 1) Dalam kebijakan tentang perumusan sanksi pidana pada tahap ini yang dilakukan adalah menghindari penjatuhan sanksi pidana secara tunggal, karena dengan perumusan tunggal kemungkinan besar anak akan tetap dijatuhi pidana. Lain halnya dengan perumusan sanksi pidana yang alternatif.
- 2) Dalam kebijakan mengenai prosedur bekerjanya sistem peradilan pidana, perlunya penegasan kembali hubungan terkait antar lembaga, yang dapat menciptakan sistem peradilan pidana bagi anak yang baik.

- 3) Mengenai kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan ini, terungkap bahwa belum adanya pedoman dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan bagi hakim dalam memutus perkara khusus untuk anak, sehingga penjatuhan pidana bagi anak hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja. Dan belum adanya diversi oleh pihak berwenang (hakim) yang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat,
- b. Tahap Aplikasi, pada tahap ini hal-hal yang dapat dikemukakan adalah :
    - 1) Penciptaan sistem peradilan pidana anak yang utuh dan terpadu, serta koordinasi antar lembaga terkait.
    - 2) Penegasan kembali tentang tahanan anak untuk mendapatkan perlakuan yang baik terpisah dari tahanan dewasa serta penempatannya di Rutan khusus anak. Demikian juga dengan realisasi putusan pengadilan untuk penempatannya di Lapas anak yang terpisah dari napi dewasa.
  - c. Tahap Eksekusi, pada tahapan ini yang dapat dilakukan adalah
    - 1) Proses pembinaan anak binaan agar tidak terorientasi pada sifat umum dari anak, namun terorientasi pada sifat khusus dari anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi sistem pembinaan yang dilakukan terorientasi pada individualisasi dari anak binaan tersebut.
    - 2) Pemenuhan hak-hak anak yang dirampas kemerdekaannya, yaitu pelaksanaan perampasan kemerdekaan tersebut mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi anak dan diupayakan perampasan



kemerdekaan tersebut sebagai upaya terakhir dan sedapat mungkin untuk waktu yang singkat.

## **B. Rekomendasi**

Bertitik tolak dari urgensi anak dalam menopang pembangunan nasional dan anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta pola perlindungan hak-hak anak yang dirampas kemerdekaannya, yang diterapkan saat ini masih menunjukkan beberapa persoalan-persoalan yang prinsipil, maka sebagai rekomendasi dari penelitian ini, adalah :

1. Bahwa pola perlindungan hak-hak anak yang kemerdekaannya dirampas, tidak hanya didasarkan kepada ketentuan hukum nasional, tetapi dikarenakan persoalan ini merupakan persoalan internasional sehingga menuntut tiap-tiap negara untuk menerapkan hasil-hasil konvensi internasional yang berkaitan dengan konsep perlindungan hak-hak anak, serta ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah masih dominan bersifat “memberlakukan”, belum kepada “menterjemahkan dan menyesuaikan” hasil-hasil konvensi tersebut dengan situasi dan kondisi internal Indonesia, maka agar ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional tersebut bersifat tindakan-tindakan aplikatif, seharusnya Pemerintah menetapkan satu badan (lembaga) khusus untuk menterjemahkan hasil-hasil konvensi internasional tersebut.
2. Bahwa dikarenakan salah satu kendala pemberian perlindungan dimaksud, adalah didasarkan kepada latar belakang pendidikan aparat yang tidak

heterogen, hanya didasarkan kepada satu jenis pendidikan (pendidikan hukum), maka hendaknya rekrutmen aparat tidak hanya didasarkan kepada kondisi ini, melainkan rekrutmen hendaknya dilakukan dari berbagai disiplin ilmu.

UPT-PUSTAK-UNDIP

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, penyunting, **Peradilan Anak di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- -----, **Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Binacipta, Bandung, 1996.
- -----, dan Achmad S. Soema Dipraja, **Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**, Binacipta, Bandung, 1979
- Bawengan, GW., **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- -----, **Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek**, Pradya Paramita, Jakarta, 1983.
- -----, GW., **Pengantar Psikologi Kriminil**, Pradya Paramita, Jakarta, 1973.
- Bellamy, Caroll, **Laporan Situasi Anak-Anak Dunia**, UNICEF, 1997.
- Bonger, WA., **Pengantar Tentang Kriminologi**, PT.Pembangunan, Jakarta, 1962.
- Cressey, dan Shutherland, **The Control of Crime**, disadur D. Sudjono, **Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana**, Tarsito, Bandung, 1974.
- Dellyana, Shanty, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Etzioni, Amitai, **Organisasi-Organisasi Modern**, alih bahasa Suryatim, UI Press, Jakarta, 1985.
- Faisal, Sanafiah, **Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Aplikasi**, Yayasan A-3, Malang, 1990.
- Gosita.Arief, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- -----, **Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

- Hadisuprpto, Paulus, **Juvenile Deliquency, Pemahaman dan Penanggulangannya**, Citra Aditya Bakti, bandung, 1997.
- Hadiwinoto, Soekotjo, **Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**, BP-UNDIP, Semarang, 1995.
- Hamzah, Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- -----, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Jones, P. Asterley dan Rupert Cross, **An Introduction to Criminal Law**, Butterworth, London, 1953.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jonkers, J.E., **Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Karni, **Ringkasan Tentang Hukum Pidana**, Jambatan, Jakarta, 1950.
- Kartini Kartono, **Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)**, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- -----, **Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja**, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Moleong, Lexy J., **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996.
- Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, BP UNDIP, Semarang, 1995.
- -----, dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- -----, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, 24 Pebruari 1990.
- -----, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1985.
- Nasution, J, **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Tarsito, Bandung, 1996.

- Nawawi Arief, Barda, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- -----, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, BP-UNDIP, Semarang, 1996.
- -----, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.
- Nusantara, Abdul Hakim G., editor, **Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Kearah Bantuan Hukum Struktural**, Alumni, Bandung, 1981.
- Packer, Herbert L., **The Limits of Criminal Sanction**, Stanford University Press, California, 1968.
- Poernomo, Bambang, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- -----, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- -----, **Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa**, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poerwadarminta, WJS, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Edisi-VI, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prinst, Darwan, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.
- Projodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989.
- Purnianti, penyunting, **Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak**, Jurusan Kriminologi FISIP-UI, Jakarta, 1999.
- Rasyidi, Lili, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Reksodiputro, Mardjono, **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, UI-Press, Jakarta, 1994.
- **Risalah Undang-Undang Pengadilan Anak, Buku I**, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 1997.

- **Risalah Undang-Undang Pengadilan Anak, Buku II**, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 1997.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, **Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum (Hukum Pidana Kodifikasi)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saleh, Roeslan, **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- -----, **Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana**, Centra, Jakarta, 1968.
- Shade, William A., **Organization and Management, Basic System Concept**, Rullin Book, Malaysia, 1974
- Sianturi, SR, **Hukum Penitensia Indonesia**, Alumni AHAEM-PETEHAE, Jakarta, 1996.
- Simanjuntak, B., **Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial**, Tarsito, Bandung, 1981.
- Soedarto, **Hukum Pidana I**, BP-UNDIP, Semarang, 1990.
- -----, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981.
- -----, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Jakarta, 1977.
- -----, **Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang 21 Desember 1974.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.
- -----, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers. Jakarta, 1995.
- Soemitro, Irma Setyowati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Ronmy Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan V, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- -----, **Metodologi Penelitian Hukum**, Cetakan-II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soesanto, IS., **Kriminologi**, BP-UNDIP, Semarang, 1995.

- Soesilo, R., **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Sepasal Demi Sepasal**, Politeia, Bogor, 1964.
- Soetoyo, Johannes, (penyunting), **Anak dan Kejahatan, Kriminologi FISIP-UI**, Jakarta, 1993.
- Supramono, Gatot. **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Jambatan, Jakarta, 2000.
- Tresna, R., **Asas-Asas Hukum Pidana.**, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- United Nation, **Human Right A Compilation of International Instrument, Volume I (first part) Universal Instrument**, New Yok, 1993.
- -----, **Human Right A Compilation of International Instrument, Volume I (second part) Universal Instrument**, New York, 1993.
- Unit Kerja Hukum FK-PPAI, **Draf Semiloka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak**, FK-PPAI dan UNICEF, Jakrta, 1998.
- -----, **Buku Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak**, FK-PPAI, Jakarta, 1992.
- -----, **Inventarisasi Pelaksanaan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1992**, FK-PPAI, Jakarta, 1992.
- Wahyono, Agung, dan Siti Rahayu, **Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

#### **MAKALAH :**

- Alam , AS dan Rusli Efendy, **Langkah-Langkah Kongkrit Untuk Menanggulangi Masalah Kenakalan Remaja**, Seminar Kriminologi III, Semarang, 26-27 Oktober 1976.
- Gosita, Arief, **Hukum Acara Peradilan Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, FH-UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Hadisuprpto, Paulus, **Hak-Hak Anak di Indonesia**, Kriminologi, FISIP-UI, Jakarta, 1999.

- -----, **Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, FH-UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Ikhsan, Edy, **Orientasi Non Humanistis dan Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Beberapa Catatan Lapangan**, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.
- Irsan, Koesparmono, **Peranan Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak**, Semiloka Draf RUU-Perlindungan Anak, FKPPAI-UNICEF, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.
- Joni, M., **Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak di Lapangan**, Semiloka RUU-Perlindungan Anak, FKPPAI-UNICEF, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.
- Julianto, Irwan, **Peran Media dan Perlindungan Anak**, Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta 12-13 Agustus 1998.
- Katjasungkana, Nursyahbani, **Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahannya**, Seminar Nasional III, UI-Masumoto Foundation Jepang, Jakarta, 1995.
- Nawawi Arief, Barda, **Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, FH-UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- -----, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)**, Penataran Metodologi Penelitian Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 11-15 Desember 1995.
- **Peristilahan Hukum Dalam Praktek**, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985
- Purnianti, **Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak**, Semiloka Draf RUU-Perlindungan Anak, FKPPAI-UNICEF, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.
- -----, **Masalah Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Makalah Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.
- -----, **Kenakalan Remaja di Perkotaan**, Seminar Kriminologi IV National Trends in Crime, FH UNDIP, Semarang, 15-18 September 1991.
- Sapardjaja, Komariah Emong, **Rumah Tahanan Bagi Anak Nakal : Sebuah Idaman**, Seminar Nasional Peradilan Anak, FH-UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.



- Shihab, Quraish, **Perlindungan Anak Dalam Segi Agama**, Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.
- Siswosoebroto, Koesriani, **Kejahatan Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Kriminologi (Beberapa Pokok Pikiran Sebagai Landasan Untuk Bahan Diskusi)**, Majalah Hukum Trisakti Jakarta, No. 23/Tahun XXI/Juli/1996.
- Soebroto, Karlinah PA., **Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Serta Pelaksanaannya Dalam Peradilan Pidana**, Lokakarya Nasional, Jakarta, 12 Juni 1995.
- Soedarto, **Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak**, Lokakarya Tentang Peradilan Anak, Semarang, 8-10 Agustus 1977.
- Soetjipto, Adi Andoyo, **Laporan International Seminar on Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency Through Community Participation**, Beijing, 12-24 Oktober 1988.
- Sub Cluster VIII/2, **Children in Conflict With The Law**, YKAI, Jakarta, 2000.
- Wirahadikusumah, Karlinah Umar, **Sambutan Lokakarya Nasional Perlindungan Anak Dalam Masyarakat dan Peranannya Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta, 12 Juni 1995.

## **PERATURAN-PERATURAN**

- **Convention on The Right of The Child**, Resolusi PBB, No. 44/25. 1989.
- **International Covenant on Civil and Political Rights**, UN Resolution 2200 A (XXI), 16 Desember 1966
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01 Pr.07.03/1985 tentang **Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan**.
- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
- **Naskah Rancangan KUHP Baru, 2000**
- **Naskah Rancangan KUHP Baru, 1993**.

- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06/1983 tentang **Tata Tertib Sidang dan Tata Ruang Sidang.**
- **Rules for The Protection Deprived of Their Liberty**, UN Resolution 44/113, New York, 1990.
- **Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rule)**, UN Departement of Public Information, New York, 1986.
- Undang-Undang No. 35/1999 tentang **Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.**
- Undang-Undang No 3/1997 tentang **Pengadilan Anak.**
- Undang-Undang No. 28/1997 tentang **Kepolisian Republik Indonesia.**
- Undang-Undang No. 12/1995 tentang **Pemasyarakatan.**
- Undang-Undang No. 5/1991 tentang **Kejaksaan.**
- Undang-Undang No. 8 /1986 tentang **Peradilan Umum.**
- Undang-Undang No 8/1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- Undang-Undang No. 4/1974 tentang **Kesejahteraan Anak.**
- Undang-Undang No. 14/1970 tentang **Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.**

#### **Media Massa**

- Kompas 12 Juni 1995.